

***ATRIBUT CORPORATE GOVERNANCE DAN VOLUNTARY
DISCLOSURE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks
Saham Syariah Indonesia)**



Diajukan oleh
Avininda Dewi Nindiasari
15919003

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

***ATRIBUT CORPORATE GOVERNANCE DAN VOLUNTARY
DISCLOSURE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham
Syariah Indonesia)**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Avininda Dewi Nindiasari

15919003

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

AVININDA DEWI NINDIASARI

No. MHS. : 15919003

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**ATRIBUT CORPORATE GOVERNANCE DAN VOLUNTARY DISCLOSURE
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM
INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Filza Roman Cahaya, SE., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Hadi Kusuma, MBA.

Mengetahui

Direktor Program Pascasarjana



Dr. Zainal Mustafa FQ., MM.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 06 Juli 2018

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitra', is written over a horizontal line.

Fitra Romlan Cahaya, SE., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 06 Juli 2018.....

A green postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEMENTERIAN PERKURANGAN REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

Avininda Dewi Nindiasari

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah saya persembahkan karya ini teruntuk kedua orang tua saya, ayahanda Supriyanto dan Ibunda Ning Rahayu. Karya ini ananda persembahkan sebagai bukti bakti dan terimakasih atas kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga serta tidak mungkin bisa ananda balas. Semoga ini menjadi awal langkah untuk membahagiakan dan memuliakan kalian. Selanjutnya teruntuk kedua orang saudara lelakiku, Ivan Kalyana Padma, S.E. dan Fahmi Tri Arsala yang telah memberikan bantuan moril dan semangat. Dan rekan-rekan semuanya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih semuanya.

KATA PENGANTAR



Allhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan S2 ini di Magister Akuntansi Program Pascasarja Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini, tak lupa peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penelitian tesis ini.

Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungannya dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS., CSRA, selaku dosen pembimbing yang telah membagi ilmunya, membimbing, dan memberikan saran untuk setiap step penyelesaian tesis ini. Pengalaman serta keahliannya telah membantu saya untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Koordinator Akademik Akuntansi Program PPS FE UII.
3. Bapak Dr. Zainal Mustafa EQ., MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (PPS FE UII).
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

5. Ayahanda Supriyanto dan Ibunda Ning Rahayu yang tak mungkin Penulis dapat membalas jasa-jasanya dengan setimpal, kakakku Ivan Kalyana Padma, S.E., dan adikku Fahmi Tri Arsala, serta seluruh keluarga besar dari pihak ayahanda dan ibunda.
6. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi FE UII angkatan 11 yang sama-sama berjuang dari semester 1 hingga saat ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juli 2018

Penulis

Avininda Dewi Nindiasari

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Berita Acara Ujian Tesis	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Keagenan	15
2.1.2 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan	15
2.1.2.1 Pengertian Pengungkapan	15
2.1.2.2 Tujuan Pengungkapan.....	16
2.1.2.3 Konsep Pengungkapan.....	17
2.1.2.4 Jenis Pengungkapan	18
2.1.3 <i>Voluntary Disclosure</i>	19
2.1.4 <i>Corporate Governance</i>	20

2.1.4.1	Pengertian <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.4.2	Asas <i>Corporate Governance</i>	21
2.1.4.3	Atribut <i>Corporate Governance</i>	22
2.2	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Hipotesis Penelitian.....	41
2.3.1	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> ...41	
2.3.2	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	42
2.3.3	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	43
2.3.4	Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	44
2.3.5	Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	45
2.4	Karakteristik Perusahaan.....	46
2.5	Kerangka Pemikiran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	51
3.3.1	Variabel Dependen.....	51
3.3.2	Variabel Independen.....	52
3.3.2.1	Ukuran Dewan Komisaris.....	52
3.3.2.2	Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	52
3.3.2.3	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	53
3.3.2.3	Frekuensi Rapat Komite Audit.....	53
3.3.2.3	Kepemilikan Keluarga.....	53
3.3.3	Variabel Kontrol.....	54
3.3.2.1	Ukuran Perusahaan.....	54
3.3.2.2	Tipe Industri.....	54
3.4	Teknik Analisis Data.....	55
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	56

3.4.3 Uji Asumsi Klasik	56
3.4.3.1 Uji Normalitas	56
3.4.3.2 Uji Multikolinearitas	57
3.4.3.3 Uji Autokorelasi	57
3.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	58
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.4.4 Pengujian Hipotesis	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	61
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	62
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Independen	62
4.2.1.1 Karakteristik Variabel Kontinu	62
4.2.1.2 Karakteristik Variabel Kategorikal	65
4.2.1.2.1 Kepemilikan Keluarga	66
4.2.1.2.2 Tipe Industri	67
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen	68
4.3 Uji Asumsi Klasik	72
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.5 Uji Hipotesis	75
4.5.1 Analisis Uji Koefisien Determinasi	75
4.5.2 Uji t	75
4.6 Pembahasan	78
4.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> ...	78
4.6.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	79
4.6.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	80
4.6.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	81
4.6.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	82
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI & SARAN	84

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Implikasi.....	84
5.2.1 Implikasi Hasil Analisis Regresi Berganda Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	84
5.2.2 Implikasi Hasil Analisis Regresi Berganda Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	85
5.2.3 Implikasi Hasil Analisis Regresi Berganda Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	85
5.2.4 Implikasi Hasil Analisis Regresi Berganda Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	86
5.2.5 Implikasi Hasil Analisis Regresi Berganda Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	87
5.3 Keterbatasan Penelitian	88
5.4 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Ringkasan Pengukuran dan Sumber Informasi Variabel Penelitian	54
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kontinu 2012-2015.....	63
4.2 Hasil Rata-rata Variabel Kontinu Tiap Tahun Penelitian	65
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kategorikal 2012-2015.....	65
4.4 Distribusi Perusahaan Berdasarkan Klasifikasi Industri Dari BEI	68
4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen.....	68
4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	73
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
4.1 Diagram Variabel Kepemilikan Keluarga.....	66
4.2 Diagram Variabel Kepemilikan Keluarga.....	67
4.3 <i>Voluntary Disclosure</i> Perusahaan Sampel Tahun 2012-2015.....	69
4.4 <i>Voluntary Disclosure</i> Per Item Pengungkapan	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1: Tabel Perusahaan yang Konsisten Terdaftar Dalam ISSI Tahun 2012-2015.....	99
Lampiran 2: Tabel Hasil Random Sampling dengan Program SPSS.	100
Lampiran 3: Tabel Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian.....	102
Lampiran 4: Verifikasi Data	103
Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik Untuk Analisis Regresi Linier Berganda.....	106
Lampiran 6: Hasil Koefisien Determinasi dan Hasil Regresi Linier Berganda .	114
Lampiran 7: Tabel Indeks	116
Lampiran 8: Tabel Skoring Indeks <i>Voluntary Disclosure</i> 2012-2015.....	117
Lampiran 9: Tabel Ukuran Dewan Komisaris 2012-2015	129
Lampiran 10: Tabel Tabel Persentase Proporsi Dewan Komisaris Independen .	131
Lampiran 11: Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	133
Lampiran 12: Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	135
Lampiran 13: Tabel Kepemilikan Keluarga.....	137
Lampiran 14: Tabel Ukuran Perusahaan.....	139
Lampiran 15: Tabel Tipe Industri Perusahaan	141

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan keluarga dan *voluntary disclosure* perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada laporan tahunan tahun 2012-2015. *Voluntary disclosure* diukur dengan menggunakan indeks yang mencakup 35 item *disclosure* sebagai *checklist* pengungkapan yang ada pada laporan tahunan yang terdaftar dalam ISSI pada tahun 2012-2015. Hasil uji statistik mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat *voluntary disclosure*. Hasil ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar dapat mengurangi kemungkinan adanya asimetri informasi, karena mereka dapat berkontribusi lebih untuk mengurangi konflik distribusi antara agen dan prinsipal. Implikasi utama hasil penelitian ini adalah adanya kesesuaian jumlah dewan komisaris dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap pemantauan proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori keagenan hanya mampu menjelaskan fenomena hubungan antara atribut *corporate governance* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI secara parsial.

Kata kunci—*Voluntary Disclosure, Corporate Governance, Indeks Saham Syariah Indonesia*

ASBTRACT

This research aims to examine the relationships between size of the board of commissioners, proportion of independent commissioner, meeting frequency of the board of commissioners, meeting frequency of the audit committee, family ownership and corporate voluntary disclosure in Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) listed companies' annual reports from 2012 to 2015.. Voluntary disclosure is measured using 35 items as the disclosure index checklist. The statistical results indicate that size of the board of commissioners is significantly associated with voluntary disclosure in a positive direction. In line with agency theory, larger size of the board of commissioner could reduce the possible presence of information asymmetry as the members of the board can give more contributions in reducing conflict distributions between the agent and the principal. The main implication of this research is that there is compatibility between the size of the board of commissioner within the sample companies with regulations, impacting on the monitoring on the transparency process and the communication effectiveness in companies. The results of this research show that agency theory can only partially explain the relationship between corporate governance and voluntary disclosure in the annual reports of companies listed on the ISSI.

Keywords— *Voluntary Disclosure, Corporate Governance, Indonesia Sharia Stock Index*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stakeholder menggunakan *corporate disclosure*¹ dalam proses pembuatan keputusan. Dimana dikutip dari Bagnolli dan Watts (2007), dalam Al-shammari (2013) mereka menyatakan bahwa perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengkomunikasikan informasi kepada *stakeholder* untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. *Corporate disclosure* digunakan untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Untuk itu dengan adanya *disclosure*, akan meningkatkan kepercayaan prinsipal yang menanamkan dananya pada perusahaan dan kepercayaan atas kinerja manajemen.

Menurut PSAK No 1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012 bagian 12). *Corporate disclosure* yang disampaikan ke OJK dapat berupa laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setahun sekali, berisi data keuangan (laporan keuangan) dan informasi non-keuangan.

Laporan tahunan dapat dikategorikalkan menjadi dua. Pertama adalah *mandatory disclosure* yang merupakan pengungkapan informasi yang wajib

¹*Corporate disclosure* dapat diarahkan kepada *stakeholder* lain selain investor, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti berfokus pada komunikasi terhadap investor.

diberitahukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepem No. Kep-38/PM/1996 yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik, yang selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan Surat Edaran Ketua Bapepem No. SE-02/PM/2002 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri dan yang terakhir diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepem No. Kep-431/BL/2012 yang mengatur tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua adalah *voluntary disclosure* yang merupakan pengungkapan informasi diluar pengungkapan wajib yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan kepada para pemakai.

Voluntary disclosure lebih banyak menjadi perhatian dikarenakan pengungkapannya yang bersifat sukarela, serta merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Lebih penting lagi, permintaan akan *voluntary disclosure* meningkat seiring dengan kontribusinya pada nilai ekuitas, likuiditas pasar, biaya modal dan secara keseluruhan untuk mengurangi masalah keagenan antara manajer dan investor luar (Akhtaruddin dan Haron, 2010). Luasnya *voluntary disclosure* juga akan berdampak pada perubahan sikap dalam sosial, faktor ekonomi dan perilaku terutama seperti *corporate culture*, dimana hal ini akan mengakibatkan kebijakan keluasan dari *voluntary disclosure* yang akan dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Voluntary disclosure dianggap memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan, terutama pada jumlah informasi yang disebarluaskan. Interaksi terhadap faktor eksternal, karakteristik perusahaan dan organ perusahaan dapat memberikan keuntungan potensial yang diterjemahkan melalui tingkat transparansi yang tinggi, atau sebaliknya potensi terhadap biaya yang menghambat kesuksesan perusahaan (Zaini, Samkin, Sharma, & Davey, 2016). Transparansi dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan menggambarkan salah satu pilar dari *corporate governance* (Shehata, 2014), dimana beberapa skandal yang terjadi berasal dari kurangnya atau adanya ketidaksesuaian dalam *corporate disclosure*. Seperti kasus pada PT Sumalindo Lestari Jaya contoh perseteruan antara pemegang saham mayoritas (Sampoerna dan Sunarko) dengan pemegang saham minoritas (Deddy Hartawan Jamin) atas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada tahun 2012 (RMOL, 2012). Dimana Deddy Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas mengajukan permohonan untuk melakukan pengecekan atas pembukuan rugi-laba perusahaan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tindakan tersebut muncul dikarenakan adanya ketidakjelasan pengungkapan informasi dalam pelaporan tahunan PT Sumalindo pada tahun 2012. Perlu diketahui lebih dari 840 ribu hektar hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri dikuasai oleh PT Sumalindo serta PT Sumalindo menguasai 30 % pasar Indonesia, bahkan ditingkat dunia. Akan tetapi pada lima tahun terakhir, PT Sumalindo tidak pernah membukukan keuntungan, malahan harga saham perusahaan mengalami penurunan, yakni pada tahun 2007 senilai Rp 4.800 sedangkan pada 2012 terjun

bebas dikisaran Rp 100. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi para pemilik saham minoritas, kemana keuntungan mereka sebenarnya? Sedangkan pada saat proses voting dalam RUPS untuk membahas masalah tersebut, Deddy Hartawan Jamin selalu kalah dalam voting.

Kasus diatas menggambarkan bahwa perusahaan tidak menyajikan informasi secara transparan tentang peristiwa apa yang terjadi kepada para *shareholder*, khususnya para pemegang saham minoritas. Kejadian tersebut berada diluar ekspektasi para pemegang saham minoritas, karena segala peristiwa yang terjadi berkaitan dengan kinerja perusahaan tidak diketahui secara detail. Bukankah pemegang saham minoritas juga memiliki hak dan akses yang sama atas pelaporan tahunan perusahaan? Karena rendahnya pengungkapan informasi tersebut, menyebabkan adanya jarak antara pihak yang mempunyai akses informasi kuat dengan pihak yang memiliki akses informasi lemah, atau dengan kata lain dalam perusahaan tersebut terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan manajemen perusahaan. Tidak hanya itu, rendahnya tranparansi tersebut juga dikarenakan tidak adanya komisaris independen atau komite audit didalam perusahaan.

Rendahnya pengungkapan informasi pada laporan tahunan di Indonesia tersebut dibuktikan pula dalam penilaian ASEAN Capital Market Forum (ACMF)² ditahun 2013, yang mana Indonesia menempati urutan kedua terbawah sebelum Vietnam dalam hal penerapan *good corporate governance*

² Poin-poin yang menjadi acuan penilaian ACMF dalam membuat penilaian diantaranya tanggung jawab direksi Emiten, keterbukaan informasi dan transparansi, serta peran dari pemangku Emiten bersangkutan. Dalam penilaian tersebut tingkat keterbukaa Emiten di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain di ASEAN. Namun, skor untuk keterbukaan informasi Indonesia rendah.

(InvestasiKontan.co.id, 2015). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida menyatakan bahwa rating perusahaan di Indonesia masih rendah dikarenakan *website* emiten masih banyak yang belum berbahasa Inggris dan keterbukaan informasinya lebih belum spesifik (Beritasatu.com, 2015).

Menurut Theo Lekatompessy, rendahnya tingkat keluasaan pengungkapan informasi di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya penerapan *good corporate governance*. Menurutnya, hal tersebut disinyalir dikarenakan oleh 2 faktor, yang pertama *The ability of the player to comply with the regulation* dan yang kedua adalah *The willingness of the player to comply with the regulation*. Untuk dimensi pertama kondisi emiten di Indonesia sangat jauh *gap*-nya. Misalnya kelas Astra yang begitu besar dimana mereka tidak ada masalah mengikuti peraturan yang berkembang, tetapi bagaimana bagi para pemain baru yang kecil dan berkaitan dengan komoditi yang sangat terpengaruh dengan aturan dan siklus pasar yang sulit saat ini. Salah satunya aturan terkait pemenuhan memiliki 3 direksi dan 3 komisaris serta komite-komite yang berjumlah 10 orang. Selanjutnya korelasinya dengan *attitude* pemilik atau CEO (*chief executive officer*) perusahaan, dimana sebagian besar emiten di Indonesia berlatar belakang perusahaan keluarga, dimana peran orang tua, ayah atau kakak sangat mewarnai arah perusahaan. Sementara untuk dimensi kedua, yaitu metode ASEAN CG *Scorecard* yang digunakan, dimana tidak sedikit emiten yang menerapkan prinsip CG dengan persepsi berbeda (Bisnis.com, 2015).

Dengan begitu lemahnya tingkat pengungkapan dan keterbukaan informasi di Indonesia tersebut diyakini dikarenakan masalah persepsi pemain dalam

perusahaan karena perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi, yaitu adanya kontrol keluarga³. Dengan begitu, individu atau pebisnis di dalam perusahaan keluarga ini lebih mendahulukan kepentingan keluarga (dalam bentuk kewajiban, loyalitas dan tanggung jawab) di atas kepentingan lainnya, termasuk kepentingan publik atau pemilik minoritas (Lukviarman, 2004). Dengan kata lain maka keterbatasan dalam pengawasan serta dalam hal pengungkapan informasi yang spesifik juga akan dibatasi dengan adanya kontrol kepemilikan tersebut. Dimana perusahaan keluarga memiliki tingkat *voluntary disclosure* lebih rendah dalam laporan tahunannya dibandingkan dengan perusahaan non keluarga (Clasessens dan Fan, 2003; Ahmad, 2007).

Kepatuhan terhadap pengungkapan wajib oleh perusahaan yang terdaftar tidak banyak bercerita tentang pengungkapan perusahaan yaitu yang berhubungan tentang informasi berwawasan ke depan (diskusi manajemen dan analisa laporan tahunan) (Eng dan Mak, 2003). Perusahaan yang terdaftar didorong untuk melaporkan informasi yang relevan dan material di samping informasi wajib yang diperlukan investor yang ada dan yang potensial agar dapat mengukur kinerja manajemen. Tetapi perusahaan biasanya tidak memberikan informasi sukarela kecuali jika keuntungan yang dirasakan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat dari tinjauan literatur bahwa pengungkapan merupakan cara penting bagi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan di antara para *stakeholder*. Pengungkapan tampaknya terkait dengan *corporate governance*. Pengimplementasian dari *corporate governance* dalam memonitor manajemen

³ Menurut PricewaterhouseCoopers (2014) menyatakan bahwa lebih dari 95% bisnis di Indonesia dimiliki oleh keluarga

sangat penting untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Dengan begitu, perusahaan dengan *corporate governance* yang baik biasanya cenderung meningkatkan insentif manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan bagi para *stakeholder* (Akhtaruddin, Hossain, Hossain, & Yao, 2009; P. Ho & Taylor, 2006).

Secara empiris, penelitian mengenai *voluntary disclosure* memang telah banyak dilakukan di berbagai negara baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya adalah Rouf (2011) di Malaysia dan Nugraheni dan Anuar (2014) di Indonesia. Pertama penelitian dari Rouf (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *board size*, *board leadership* dan *board audit committee* dengan pengungkapan sukarela. Sedangkan untuk proporsi dari *Independent non-executive directors*, struktur kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luasnya pengungkapan sukarela. Yang kedua penelitian dari Nugraheni dan Anuar (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap kuantitas dari pengungkapan sukarela, sementara kualitas dari pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tipe industri.

Untuk itu peneliti tertarik untuk menilai tingkat *voluntary disclosure* dan variabel yang berpengaruh terhadap praktik *voluntary disclosure* di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji *voluntary disclosure* di Indonesia dan menghubungkannya dengan *corporate governance*. Kebanyakan penelitian sebelumnya menguji praktik *voluntary disclosure* dan faktor yang mempengaruhinya pada negara dengan pangsa pasar yang tinggi seperti USA, UK dan Negara Bagian di Eropa, relatif sedikit yang melakukan penelitian pada

negara berkembang seperti Indonesia (Achmad, 2007). *Corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan keluarga dengan mengadopsi dan menyesuaikan *disclosure index* yang dibangun oleh Khomsiah (2005) dalam Nugraheni dan Anuar (2014) serta Akhtaruddin dan Haron (2010) disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012⁴.

Selanjutnya disini peneliti akan menggunakan periode penelitian lebih dari satu tahun atau *longitudinal analysis* pada perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta tata cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Hal ini menjadi menarik, dimana perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya merupakan perusahaan *non-shariah compliant companies* akan tetapi sahamnya terdaftar dalam bursa saham syariah, seperti perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dikarenakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) baru diluncurkan pada tanggal 12 mei 2011, maka peneliti menggunakan rentang waktu penelitian yang dimulai dari tahun 2012-2015.

Perhatian mengenai *voluntary disclosure* di Indonesia terus meningkat sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait *voluntary disclosure* di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini “**Atribut Corporate Governance dan**

⁴ Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 berisi tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik

Voluntary Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia?
3. Apakah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia?
4. Apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia?
5. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia.
2. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia

3. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris apakah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia.
4. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia.
5. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, ada pun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Pertama, penelitian ini berfokus pada *voluntary disclosure*, yaitu pengungkapan secara keseluruhan informasi (*financial dan non-financial disclosure*) yang tidak masuk dalam pengungkapan wajib (menurut Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012). Yang kedua, adanya variabel kepemilikan keluarga. Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan kepemilikan keluarga yang besar (Achmad, 2007). Hal itu menjadi salah satu kelemahan *corporate governance* di Indonesia, dimana Indonesia menjadi peringkat kedua terbawah di ASEAN pada tahun 2013. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang mana perusahaan yang terdaftar dalam saham ini diseleksi terlebih dahulu, yaitu diseleksi untuk masuk dalam Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia jika memenuhi kriteria prinsip

syariah. Diyakini bahwa perusahaan yang terdaftar dalam saham tersebut memiliki perhatian tinggi terhadap *voluntary disclosure*.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rangka evaluasi maupun dalam pembuatan regulasi tentang *voluntary disclosure*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan tentang pentingnya *voluntary disclosure*, khususnya di Indonesia yang memiliki bisnis yang dikendalikan oleh keluarga, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan *voluntary disclosure* guna membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi akademisi, atau penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penulisan secara menyeluruh.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, landasan teori ini diperoleh dari berbagai studi literatur yang berkaitan dengan topik. Dalam bab ini juga dijelaskan pula mengenai kerangka pemikiran serta penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumen terhadap hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan muncul untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsipal (*shareholders*) dan agen (manajemen) (Barako, Hancock, dan Izan 2006; Karajeh, Ibrahim, dan Lode 2017). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah hubungan kontraktual dimana satu orang atau lebih pemegang saham (prinsipal) terhadap pihak lain yaitu manajemen (agen), dimana agen dituntut untuk melakukan beberapa jasa atas nama prinsipal dan melibatkan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen⁵.

Isu utama yang menjadi perhatian perusahaan menurut Barako, Hancock, dan Izan (2006b) adalah adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Dalam hubungan keagenan, internal perusahaan (manajemen) memiliki keuntungan informasi. Oleh karena itu, pemilik menghadapi dilema moral karena mereka tidak dapat secara akurat mengevaluasi dan menentukan nilai dari keputusan yang dibuat. Dengan demikian, agen mengambil keuntungan dari kurangnya pengamatan pemilik yang terlibat dalam aktivitas untuk meningkatkan tujuan pribadinya. Untuk mengurangi konflik antara agen-pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menurut Healy dan Palepu (2001) dengan cara mengoptimalkan kontrak antara

⁵ Diskusi lebih lanjut tentang padanangan teori keagenan dalam sebuah perusahaan, lihat Jensen dan Meckling (1976).

pihak manajemen dengan pemegang saham, membuat kebijakan yang mengatur tentang pengungkapan berbagai informasi yang harus dilakukan perusahaan dan mengoptimalkan fungsi dari *intermediaries* (analisis keuangan dan lembaga pemeringkat) sebagai pengawas atau pengontrol atas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Selain itu, adanya *agency problem* menimbulkan adanya *agency cost* (Jensen dan Meckling (1976), yaitu biaya yang digunakan untuk mengurangi *agency problem* yang. *Agency cost* terdiri atas:

- a. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk memonitor perilaku agen dalam hal pengelolaan perusahaan.
- b. *The bonding expenditure by the agent (bonding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang merugikan prinsipal.
- c. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas atau penurunan kesejahteraan prinsipal maupun agen karena timbulnya hubungan keagenan.

Untuk mengurangi *agency cost*, pengungkapan memiliki peranan besar untuk mengurangi terjadinya *agency problem*. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi *agency problem*, yaitu (Healy dan Palepu 2001):

- a. Mengoptimalkan kontrak antara pemegang saham dengan manajemen, seperti kesepakatan atas kompensasi dan kontrak hutang, dengan berusaha menyelaraskan kepentingan manajemen dengan *external equity* dan *debt claimants*.

- b. Mengoptimalkan Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris berperan untuk memantau dan mendisiplinkan manajemen atas nama pemilik eksternal.
- c. Memaksimalkan keberadaan *intermediaries*, seperti analisa keuangan dan lembaga pemeringkat, sebagai pengawas atau pengontrol atas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Didalam penelitian ini, *voluntary disclosure* menyajikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori keagenan, dalam arti bahwa manajemen yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi perusahaan dapat membuat komunikasi yang *credible* dan *reliable* kepada pasar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Barako, Hancock, dan Izan 2006b).

2.1.2 Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) berarti memberikan data yang bermanfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan. Dalam suatu perusahaan, pihak yang memiliki kepentingan tersebut yaitu *stakeholder*. Informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* ini adalah berupa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu perusahaan.

Menurut PSAK No 1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012 bagian 12). *Corporate disclosure* yang disampaikan ke OJK dapat berupa laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setahun sekali, berisi data keuangan (laporan keuangan) dan informasi non-keuangan.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Wolk, Tearney dan Dodd (2001:302) dalam Suwardjono (2011:579) menginterpretasi definisi pengungkapan sebagai berikut:

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements dan supplementary communications including footnes, post-statement events, management’s discussion dan analysis of operations for the forthcoming year, financial dan operating forecasts, dan additional financial statements covering segmental disclosure dan extentions beyond historical cost”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tidak hanya berupa laporan keuangan saja, akan tetapi statemen keuangan segmental dan *statement* yang merefleksi perubahan harga juga merupakan bagian dari pengungkapan.

2.1.2.2 Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Suwardjono (2011:580), pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi (*protective*), informatif (*informative*), atau melayani kebutuhan khusus (*diffeerential*).

Maksud dari tujuan melindungi (*protective*) disini adalah untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*), sehingga diharapkan dengan tujuan ini tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Selanjutnya dalam tujuan informatif (*informative*), pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. Sedangkan tujuan kebutuhan khusus (*diffeerential*) merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2.1.2.3 Konsep Pengungkapan

Menurut Belkaoui (2004: 225-226) dalam Wardani (2012), terdapat tiga konsep yang umumnya diungkapkan, yaitu:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup) yang berarti pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana informasi dan angka-angka yang disajikan dalam laporan tahunan dapat diinterpretasikan oleh investor dan para pihak yang berkepentingan.
2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar) menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca.

3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh) berarti penyediaan semua informasi yang dianggap cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan keputusan yang akan diambil pengguna laporan keuangan. Pengungkapan informasi yang berlebih atau melimpah dipandang tidak baik dan dapat membahayakan, karena dapat mengaburkan tafsiran informasi dan dapat merugikan kompetitif perusahaan sendiri.

Di Indonesia, konsep pengungkapan yang digunakan yaitu *fair disclosure* (pengungkapan wajar) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Martani, 2018).

2.1.2.4 Jenis Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan terdiri atas dua jenis, antara lain (Wardani, 2012):

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam laporan tahunan perusahaan yang diwajibkan dan disyaratkan oleh *Companies Act*, relevan dengan standar akuntansi serta diatur oleh suatu peraturan pasar modal di negara tertentu.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi tambahan dari pengungkapan wajib dan tidak diatur oleh peraturan yang berlaku atau standar akuntansi.

2.1.3 *Voluntary Disclosure*

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan *voluntary disclosure* sebagai “informasi utama yang berasal dari luar laporan keuangan yang tidak secara eksplisit disyaratkan oleh peraturan yang berlaku atau standar akuntansi” (Zunker, 2011). Sedangkan menurut Meek dkk. (1995:555) dan Hassan dan Marston (2010:7) dalam Shehata (2014) *voluntary disclosure* merupakan pilihan bebas dalam bagian manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan lainnya yang dianggap relevan untuk keputusan yang dibutuhkan pemakai dalam laporan tahunannya, selain itu didalamnya termasuk pengungkapan yang direkomendasikan oleh pihak atau badan yang berwenang.

Voluntary disclosure yang dilakukan setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung oleh tingkatan pengungkapan yang disediakan oleh sumber-sumber lain. Namun, didalam *voluntary disclosure* memuat informasi yang sangat berhubungan dengan *mandatory disclosure* dimana ukuran dari pengungkapan melebihi syarat minimum dari *mandatory disclosure* dan informasi tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung dengan *mandatory disclosure* (Qu, Leung, dan Cooper 2013).

Voluntary disclosure juga diklasifikasikan oleh para akademisi kedalam tiga tipe, yang pertama informasi strategis yang didalamnya berisi informasi perusahaan secara umum, strategi perusahaan, akuisisi dan *disposals*, R & D, dan prospek kedepan; dan Informasi keuangan yang didalamnya berisi pengungkapan informasi segmen, review keuangan, informasi mata uang asing, informasi harga saham dan informasi non-keuangan. Didalam informasi non-keuangan ini berisi

tentang direktur, informasi karyawan dan kebijakan sosial (Mek dkk., 1995; Eng dan Mak, 2003 dalam Qu, Leung, dan Cooper 2013).

2.1.4. Corporate Governance

2.1.4.1 Pengertian *Corporate Governance*

Dalam arti luas, *corporate governance* menurut Cadbury (1999) dalam Achmad (2007) adalah merujuk pada bagaimana menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan sosial dan tujuan antara individu dan kelompok dan dengan cara demikian, tujuan kerangka tata kelola adalah mendorong penggunaan sumberdaya secara efisien dan dengan kata lain, menuntut pertanggungjawaban kepada para pengurus atas sumberdaya yang mereka miliki. Sedangkan dalam artian sempit, *corporate governance* merupakan “sistem yang mana perusahaan diarahkan dan dikontrol”.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 *corporate governance* adalah struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Sedangkan menurut PMK No 88/PMK.06/2015 menyebutkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan

setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

2.1.4.2 Asas *Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2006).

1. *Transparency* (transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (akuntabilitas).

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban).

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharakesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Keberadaan *corporate governance* menjadi salah satu alat untuk melindungi *stakeholder* yang hanya memiliki sedikit informasi tentang perusahaan. *Corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan *corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

2.1.4.3 Atribut *Corporate Governance*

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 proksi yang menggambarkan *corporate governance*, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga.

a. Dewan Komisaris

Menurut POJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam POJK No 33/POJK.04/2014 pasal 20 tentang keanggotaan menyebutkan bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Selanjutnya dalam pasal 24 menyebutkan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

b. Dewan Komisaris Independen

Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang Komisaris Independen yang dimuat dalam POJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana menurut peraturan tersebut Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya pada pasal 21 ayat 2 (dua), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris independen bersama dengan dewan komisaris memiliki tugas utama meliputi (Surya dan Yustiavandana, 2006:138):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab (*accountability*).

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan atau dengan kata lain memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).
4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) atau hal ini;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat dan jelas.

c. Komite Audit

Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam peraturan tersebut, dalam pasal 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Pada komposisi, struktur dan keanggotaan pada pasal 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) menyatakan bahwa:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Pada pasal 9 (sembilan) disebutkan bahwa Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selanjutnya pada pasal 11 (sebelas), dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang memainkan peran penting dalam *corporate governance*. Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih dalam garis keluarga. Menurut Zahra, Hayton dan Salvato (2004) perusahaan keluarga adalah mereka yang memiliki anggota keluarga dengan beberapa kepemilikan yang dapat diidentifikasi dari kepemilikan anggota keluarga perusahaan dan beberapa generasi dalam posisi kepemimpinan dalam perusahaan (Achmad, 2007). Dimana pemilik atau anggota dari keluarga tersebut berasal dari hubungan darah atau pernikahan tersebut sebagai *officer*, *director*, atau *blockholder*, baik secara individual maupun group (Danerson dan Reeb, 2003 dalam Villalonga dan Amit, 2012).

Faktor lain perusahaan dapat dikatakan memiliki pengendalian keluarga yaitu jika kepemilikan saham terbesarnya adalah keluarga dan saham tersebut

lebih besar 20% atau 10% dari ambang batas kontrol pemungutan suara (Morck dan Yeung 2004). Selanjutnya baik CEO dan/atau ketua dewan direksi berasal dari anggota keluarga (Villalonga dan Amit, 2012).

Westhead dan Cowling (1988) berpendapat bahwa perusahaan keluarga menjadi subyek penting untuk dipelajari karena: (1) mayoritas bisnis independen dimiliki oleh keluarga, (2) tujuan utama pemilik bisnis keluarga cenderung berbeda dari pemilik bisnis non-keluarga, (3) bisnis keluarga cenderung dikelola secara berbeda dari bisnis non-keluarga, (4) pemilik bisnis keluarga lebih cenderung mementingkan untuk mengalihkan bisnis kepada generasi anggota keluarga selanjutnya, dan (5) mendorong daya saing, menciptakan kekayaan, dan *job generation* (Achmad, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Yang pertama Chen dan Jaggi (2000) meneliti tentang hubungan antara *independent non-executive directors*, *family control* dan *financial disclosure* di Hongkong pada tahun 1993 dan 1994. Dari penelitian ini ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan keuangan secara komprehensif.

Ho dan Wong (2001) meneliti tentang hubungan *corporate governance structure* dengan keluasan *voluntary disclosure* pada tahun 1997 dengan sampel 98 CFO dan 92 analis keuangan pada perusahaan yang listing di Hong Kong. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa *existence of an audit committee* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure* sedangkan *family member* berpengaruh negatif terhadap *voluntary disclosure*.

Haniffa dan Cooke (2002) meneliti tentang *Culture, Corporate Governance* terhadap *voluntary disclosure* pada tahun 1995 dengan sampel berjumlah 167 yang listing di Kuala Lumpur Stock Exchange. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa *non-executive directors* dan *family members on boards* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure* dan faktor *cultur (proportion of Malay Director on the board)* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Laksmna (2008) meneliti tentang *Corporate Board Governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap *Executive Compensation Practices* pada *nonregulated industries* di *Standard & Poor's (S&P) 500* pada tahun 1992, 1993 dan 2002. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa frekuensi rapat dewan dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap transparansi praktik pengungkapan dewan.

O'Sullivan, Percy, & Stewart (2008) meneliti tentang hubungan antara *Corporate Governance Attributes* dengan *forward-looking information* dalam laporan tahunan di Australia pada tahun 2002 dengan sampel sebanyak 183 perusahaan. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa Pada tahun 2000, *audit quality, consisting of presence dan independence of the audit committee (meeting frequency)*, big 6 auditor, dan auditor independen berpengaruh positif terhadap *forward-looking information disclosure*. *Board committee*, komite kompensasi independen dan pembuatan komite kompensasi juga berpengaruh positif terhadap *forward-looking information disclosure*.

Akhtaruddin dkk. (2009) meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Voluntary Disclosure* di Malaysia pada tahun 2002 dengan sampel 562 perusahaan yang listing di *Malaysian Stock Exchange*. Hasilnya menunjukkan bahwa *board size* dan *proportion of Independent Non-executive Directors* berpengaruh positif terhadap keluasan *voluntary disclosure*. Sedangkan *Family control* dan *audit member committee* berpengaruh negatif terhadap keluasan *voluntary disclosure*.

Rouf (2011) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan, atribut tata kelola dan keluasan pengungkapan sukarela pada tahun 2008 dengan sample berjumlah 120 yang telah listing di *Dhaka Stock Exchange*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *board size*, *board leadership* dan *board audit committe* dengan pengungkapan sukarela. Sedangkan untuk proporsi dari *Independent non-executive directors*, struktur kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luasnya pengungkapan sukarela.

Li, Mangena, dan Pike (2012) melakukan penelitian mengenai efek karakteristik komite audit dalam *intellectual capital disclosure* pada tahun 2005 di Inggris. Hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi rapat dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Achmad (2012) meneliti tentang transparansi dewan komisaris menurut teori agensi dan teori stewardship pada tahun 2004-2010 pada perusahaan publik yang listing di BEI. Hasil menunjukkan bahwa proporsi dewan independen menurut *agency theory* berpengaruh negatif sedangkan dewan komite audit pertemuan dewan menurut *agency theory* berpengaruh positif terhadap

pengungkapan sukarela. Proporsi pada *insider* menurut *stewardship theory* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. *Board size*, Frekuensi pertemuan dewan menurut *agency theory* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, menolak *stewardship theory*.

Allegrini dan Greco (2011) meneliti tentang pengaruh *corporate boards* dan *audit committee* terhadap *voluntary disclosure* pada tahun 2007 dengan sampel 186 perusahaan industri dan jasa yang listing di Italian Stock Exchange. Hasil menunjukkan bahwa dari tujuh variabel *corporate governance* dan empat variabel kontrol, ditemukan bahwa *board size* dan *audit committee meeting frequency* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*.

Al-Janadi, Rahman, & Omar (2013) yang meneliti tentang mekanisme *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure* pada tahun 2006 dan 2007 dengan jumlah sampel perusahaan yang diteliti sebanyak 87 perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa hanya hipotesis untuk *proportion of non-executive independent directors*, *audit quality* dan *government ownership* diterima.

Nugraheni dan Anuar (2014) dengan fokus pada penelitian untuk mengetahui hubungan antara pengungkapan sukarela terhadap karakteristik perusahaan. Penelitian dilakukan di Indonesia pada tahun 2009 dengan masing-masing sampel berjumlah 55 untuk perusahaan yang menerapkan kepatuhan syariah dan tidak menerapkan kepatuhan syariah. Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap kuantitas dari pengungkapan sukarela, sementara kualitas dari pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tipe industri.

Rangkuman penelitian terdahulu mengenai *Corporate Governance dan Voluntary Disclosure* dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Teori dan Sumber Data	Variabel	Hasil Penelitian
1	Chen Dan Jaggi (2000) <i>Association Between Independent Non-Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures In Hong Kong</i>	Tidak menyebutkan teori yang digunakan. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada HSE dari tahun 1993 dan 1994	Variabel Dependen <i>Financial Disclosures</i> Variabel Independen 1. <i>Proportion of Independent non-executive directors</i> 2. <i>Family Control</i> Variabel Kontrol 1. <i>Company Size</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Risk Factor</i> 4. <i>Time Period of Disclosure</i>	1. <i>Proportion of Independent non-executive directors on corporate boards</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial disclosures</i> . 2. Perusahaan dengan <i>Proportion of Independent non-executive directors for family control</i> lebih lemah daripada <i>non-family controlled firms</i>
2	Ho Dan Wong (2001) <i>A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure</i>	<i>Agency Theory</i> Survei kuisisioner terhadap 610 CFO seluruh perusahaan yang listing di Hongkong pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998.	Variabel Dependen <i>Extent of Voluntary Disclosure</i> Variabel Independen 1. <i>Proportion of Independent non-executive directors (+)</i> 2. <i>Existence of an Audit Committee (+)</i> 3. <i>Existence of Dominant Personalities (-)</i> 4. <i>Proportion of Family Members on Board (-)</i>	1. <i>Proportion of Independent non-executive directors on corporate boards</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> 2. <i>Existence of an Audit Committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> 3. <i>Existence of Dominant Personalities</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> 4. <i>Proportion of Family Members on Board</i> berpengaruh positif terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> .

3.	<p>Haniffa Dan Cooke (2002) <i>Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations</i></p>	<p><i>Agency Theory, Resource Dependence Theory dan Stewardship Theory</i></p> <p>Laporan Tahunan perusahaan publik yang terdaftar dalam <i>Kuala Lumpur Stock Exchange</i> pada tahun 1995 dengan 167 perusahaan yang disurvei.</p>	<p>Variabel Dependen <i>Extent of Voluntary Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>a. <i>Corporate Governance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proportion of non-executive directors</i> (+) 2. <i>Proportion of family members</i> (-) 3. <i>Role duality</i> (-) 4. <i>Non-executive chairperson</i> (+) 5. <i>Proportion of board of directors with cross-directorships</i> (+) 6. <i>Chairperson with cross-directorships</i> (+) <p>b. <i>Cultural Characteristics</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Malay managing director</i> (-) 2. <i>Malay finance director</i> (-) 3. <i>Malay chairperson</i> (-) 4. <i>Proportion of Malay directors</i> (-) 5. <i>Proportion of Malay shareholdings</i> (-) <p>c. <i>Education BOD</i> (+)</p> <p>d. <i>Education of Financial Contriller</i> (+)</p> <p>e. <i>Firms Characteristic</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> (+) 2. <i>Gearing</i> (+) 3. <i>Diversification</i> (+) 4. <i>Complexity</i> (+) 5. <i>Assets-in-place</i> (-) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>Non-executive chairperson</i> dan <i>Proportion of family members</i> sesuai dengan hipotesis penelitian. 2. Untuk variabel <i>Cultural Characteristics</i> tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap <i>voluntary disclosure</i>. 3. Untuk variabel <i>Firms Characteristic, Assets-in-place</i> dan <i>Ownership structure</i> sesuai dengan hipotesis penelitian. 4. Untuk variabel <i>Peformance, industry type</i> dan <i>profitability</i> sesuai dengan hipotesis penelitian.
----	---	--	--	---

			<p>6. <i>Ownership structure (+)</i> <i>f. Performance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Profitability (+)</i> 2. <i>Industry type</i> 3. <i>Multiple listing (+)</i> 4. <i>Type of auditor (+)</i> 5. <i>Listng age (-)</i> 6. <i>Foreign activities (+)</i> 	
4.	<p>Laksmna (2008) <i>Corporate Board Governance and Voluntary Disclosure of Executive Compensation Practices</i></p>	<p>Tidak menyebutkan teori yang digunakan.</p> <p>Laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar dalam Standard & Poor's (S&P) 500 pada tahun 1993 dan 2002. Pada tahun 1993 sampel sebanyak 218 perusahaan dan tahun 2002 sampel sebanyak 232 perusahaan.</p>	<p>Variabel Dependen <i>Extent of Executive Compensation Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board and compensation committee (+)</i> 2. <i>Compensation committee report (-)</i> 3. <i>Compensation committee report with busy boards</i> 	<p>Pada tahun 1993, <i>board and compensation committee</i> independen lebih mengungkapkan <i>executive compensation disclosure</i>. Hasilnya menunjukkan pula bahwa CEO memberi pengaruh terhadap proses seleksi direksi dan dewan independen (komite kompensasi) memainkan peranan dalam melakukan praktik pengungkapan dewan. Pada periode 1993 dan 2002, frekuensi pertemuan dewan (komite kompensasi) ukuran dewan (komite kompensasi) memiliki pengaruh positif terhadap praktik transparansi kompensasi.</p>
5	<p>O'sullivan, Percy, & Stewart (2008) <i>Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and Their Association With Forward-Looking Information in The</i></p>	<p>Tidak menyebutkan teori yang digunakan.</p> <p>Laporan tahunan pada 300 perusahaan publik yang diidentifikasi pada Business Review Weekly</p>	<p>Variabel Dependen <i>Forward-Looking Information Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board atonomy</i> 2. <i>Presence and Quality of Board</i> 	<p>Pada tahun 2000, <i>audit quality, consisting of presence dan independence of the audit committee (meeting frequency)</i>, big 6 auditor, dan auditor independen berpengaruh positif terhadap <i>forward-looking information disclosure</i>.</p>

	<i>Annual Report</i>	pada tahun 2000 dan 2002	<i>Committees</i> 3. <i>Independent Ownership</i> 4. <i>Audit Quality</i>	<i>Board committee</i> , komite kompensasi independen dan pembuatan komite kompensasi juga berpengaruh positif terhadap <i>forward-looking information disclosure</i> .
6	Akhtaruddin Dkk. (2009) <i>Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms</i>	<i>Agency Theory</i> Laporan tahunan perusahaan publik yang listing di Bursa Malaysia pada tahun 2002 dengan sampel sebanyak 105 perusahaan	Variabel Dependen <i>Voluntary Disclosure</i> Variabel Independen 1. <i>Board size</i> (+) 2. <i>Proportion of independent non-executive directors</i> (+) 3. <i>Outside share ownership</i> (+) 4. <i>Family controlled</i> (-) 5. <i>Proportion of audit committee</i> (+) Variabel Kontrol 1. <i>Company Size</i> (+) 2. <i>Profitability</i> (+) 3. <i>Leverage</i> (+) 4. <i>Nature of audit firms</i> (+)	1. <i>Board size</i> , <i>Proportion of independent non-executivr directors</i> , <i>Outside share ownership</i> , <i>Family controlled</i> , <i>Proportion of audit committee</i> dan <i>profitability</i> mendukung hipotesis penelitian. 2. Untuk <i>Proportion of audit committee</i> , <i>Company Size</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Nature of audit firms</i> tidak mendukung hipotesis penelitian.
7.	Rouf (2010) <i>Corporate Characteristics , Governance Attributes and The Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh</i>	<i>Agency Theory</i> Laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar dalam Dhaka Stock Exchange (DSE) pada tahun 2008 dengan sampel sebanyak 120 perusahaan.	Variabel Dependen <i>Voluntary Disclosure</i> Variabel Independen 1. <i>Firm Size</i> (+) 2. <i>Profitability</i> (+) 3. <i>Proportion of independent non-executive directors</i> (+) 4. <i>Audit Committee</i> (+) 5. <i>Dual Leadership</i> (+) Variabel Kontrol:	1. <i>Proportion of independent non-executive directors</i> berpengaruh negatif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . 2. <i>Audit Committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . 3. <i>Dual Leadership</i> positif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . 4. <i>Board Size</i> positif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . 5. <i>Pofitability</i> berpengaruh negatif terhadap <i>voluntary disclosure</i>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ownership structure</i> 2. <i>Board Size</i> 	
8.	Li, Mangena, Dan Pike (2012) <i>The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure</i>	<p><i>Agency Theory</i></p> <p>Laporan keuangan perusahaan yang listing pada London Stock Exchange (LSE) pada tahun 2005 sebanyak 100 sampel yang digunakan. Untuk IC Information perusahaan menggunakan penilaian perusahaan melalui pasar modal.</p>	<p>Variabel Dependen <i>Intellectual Capital Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>AC size</i> (+) 2. <i>Frequency of audit committee meetings</i> (+) 3. <i>Audit committee Independence</i> (+) 4. <i>Audit committee directors shareholding</i> (-) 5. <i>Audit committee financial expertise</i> (+) <p>Variabel Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board Independence</i> 2. <i>Share ownership concentration</i> 3. <i>Listing age</i> 4. <i>Profitability</i> 5. <i>Firms size</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>AC size</i> berpengaruh positif dan berpengaruh terhadap <i>ICD</i>. 2. <i>Frequency of audit committee meetings</i> berpengaruh positif terhadap <i>ICD</i>. 3. <i>Audit committee Independence</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ICD</i>. 4. <i>Audit committee directors shareholding</i> berpengaruh negatif terhadap <i>ICD</i>. 5. <i>Audit committee financial expertise</i> berpengaruh negatif terhadap <i>ICD</i>. 6. Untuk variabel kontrol <i>Board Independence, Profitability dan Firms size</i> berpengaruh positif terhadap <i>ICD</i> serta <i>Share ownership concentration</i> dan <i>Listing age</i> berpengaruh negatif.
9.	Achmad, 2012 Dewan Komisaris Dan Transparansi : Teori Keagenan Atau Teori <i>Stewardship</i> ?	<p><i>Agency Theory</i> dan <i>Stewardship Theory</i></p> <p>Laporan tahunan dan website perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2010.</p>	<p>Variabel Dependen Luas Pengungkapan Sukarela</p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Proporsi dewan independen (+), b. Proporsi pada <i>insider</i> (-) 2. a. <i>Board size</i> (+), b. <i>Board size</i> (-) 3. a. Frekuensi pertemuan dewan (+), b. Frekuensi pertemuan dewan (-) 4. Dewan komite audit (+) <p>Variabel Kontrol:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi dewan independen menurut <i>agency theory</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. 2. Proporsi pada <i>insider</i> menurut <i>stewardship theory</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. 3. <i>Board size</i>, Frekuensi pertemuan dewan menurut <i>agency theory</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, menolak

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan 2. Leverage 3. Jenis industri 	<p><i>stewardship theory.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan komite audit pertemuan dewan menurut <i>agency theory</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
10.	Allegrini Dan Greco (2011) <i>Corporate Boards , Audit Committees and Voluntary Disclosure : Evidence From Italian Listed Companies</i>	<p><i>Agency Theory</i></p> <p>Laporan tahunan perusahaan publik yang listing pada Italian Stock Exchange pada tahun 2007 dengan 177 perusahaan sebagai sampel.</p>	<p>Variabel Dependen <i>Voluntary Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proportion of independent directors (+)</i> 2. <i>Board size (+)</i> 3. <i>CEO duality (-)</i> 4. <i>Lead independent director (-)</i> 5. <i>Board committee (+)</i> 6. <i>Board dan audit committee diligence (+)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proportion of independent directors, Lead independent director dan Board committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary disclosure.</i> 2. <i>Board size dan meeting frequency</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>voluntary disclosure.</i> 3. <i>CEO duality</i> tidak berpengaruh signifikan.
11.	Al-Janadi, Rahman, Dan Omar (2013) <i>Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure In Saudi Arabia</i>	<p><i>Agency Theory</i></p> <p>perusahaan publik yang listing di Saudia S Arabia pada tahun 2006 dan 2007 dengan 87 perusahaan sebagai sampel.</p>	<p>Variabel Dependen <i>Voluntary Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proportion of non-executive independent directors (+)</i> 2. <i>Proportion of family members on the board (-)</i> 3. <i>Board size (+)</i> 4. <i>Independent audit committee members (+)</i> 5. <i>Separation of the CEO dan Chair position (+)</i> 6. <i>Audit quality (big 4) (+)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis untuk <i>Proportion of non-executive independent directors, Audit quality dan Government ownership</i> diterima. 2. Hipotesis untuk <i>Proportion of family members on the board , Board size, Independent audit committee members, Separation of the CEO dan Chair position</i> ditolak.

			7. <i>Government ownership (-)</i>	
12.	Nugraheni Dan Anuar (2014) <i>Implications of Shariah on The Voluntary Disclosure of Indonesian Listed Companies</i>	<i>Accountability Theory</i> Laporan Tahunan perusahaan publik (kecuali perusahaan perbankan dan asuransi) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dengan sampel 55 perusahaan SCC dan 55 non-SCC	Variabel Dependen <i>Voluntary Disclosure (Quantity dan quality antara SCC dan non SCC)</i> Variabel Independen 1. <i>Company size</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Type of audit firms</i> 4. <i>Type of industry</i> 5. <i>Ownership structures</i>	1. Untuk <i>quantity</i> dari <i>voluntary disclosure</i> , hanya <i>company size</i> yang memiliki pengaruh signifikan. 2. Untuk <i>quality</i> dari <i>voluntary disclosure</i> , hanya <i>Company size</i> dan <i>Type of industry</i> .

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Peran dari dewan komisaris adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas (Surya dan Yustiavandana, 2006:137). Kemampuan dari dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan pengendalian meningkat sebanyak penambahan dewan komisaris (Achmad, 2012). Jumlah dewan komisaris yang besar dapat mengurangi kemungkinan adanya asimetri informasi (Chen dan Jaggi, 2000), karena mereka dapat berkontribusi lebih untuk mengurangi konflik distribusi antara agen dan prinsipal. Dengan lebih banyak dewan komisaris, pengalaman dan keahlian dewan juga akan meningkat, dan oleh karena itu, kebutuhan akan pengungkapan informasi juga akan meningkat (Akhtaruddin dkk. 2009)⁶. Untuk itu, memungkinkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keluasan *voluntary disclosure* (Achmad, 2012; Akhtaruddin dkk., 2009; Allegrini & Greco, 2011). Dengan begitu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure*

⁶Akan tetapi dewan komisaris tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil (Jensen, 1993 dan Lipton dan Lorsch, 1992 dalam Allegrini dan Greco 2011; Alnasser 2012). Jensen (1993) mengklaim bahwa dewan komisaris tidak boleh melebihi tujuh atau delapan anggota, sementara Lipton dan Lorsch (1992) menganjurkan batas sepuluh anggota, dimana ukuran itu lebih baik dari delapan atau sembilan.

2.3.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Untuk mengurangi konflik keagenan, kehadiran komisaris independen dalam dewan memainkan peran yang penting (Darmadi dan Sodikin, 2013). Dimana keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi (Surya dan Yustiavandana, 2006:135). Fama dan Jensen (1983) menyarankan agar sebagian besar terdiri dari dewan komisaris dari luar untuk memastikan pemantauan manajemen yang lebih baik. Oleh karena itu, dewan komisaris yang lebih independen akan mengurangi konflik keagenan dan hal itu mungkin terjadi karena pengungkapan informasi lebih dalam laporan tahunan (Abeywardana dan Pdanitharathna, 2016). Karena pada dasarnya komisaris independen memiliki peranan yang sama dengan dewan komisaris yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas (Surya dan Yustiavandana, 2006:137). Serta dengan adanya pengawasan oleh pihak independen yang profesional maka dimungkinkan transparansi akan pengungkapan dan keluasan informasi akan meningkat. Selain itu, anggota komisaris independen dapat memberikan saran lebih baik kepada manajemen karena pengalaman, keahlian dan jaringan mereka.

Sejalan dengan itu, hal ini memungkinkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*, seperti hasil penelitian dari Chen dan Jaggi (2000) dan Al-Janadi, Rahman, & Omar (2013). Dengan begitu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure*

2.3.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Dalam teori keagenan, frekuensi rapat dalam dewan komisaris dapat mempengaruhi kekuatan dari komponen *corporate governance* perusahaan (Khancel, 2007 dalam Albawwat, Yazis, dan Basah, 2015). Rapat dewan komisaris merupakan struktur dan mekanisme kerja dari organ perusahaan (struktur dan mekanisme kerja dari dewan komisaris). Adanya rapat dewan komisaris akan memfasilitasi pembagian informasi yang lebih baik diantara para dewan dan memungkinkan untuk pembagian tugas didalam komite yang lebih baik (Laksmna, 2008). Tugas tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen (*accountability*) serta memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*transparency*) (Surya dan Yustiavandana, 2006:138). Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memonitor manajer dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi masalah keagenan (Albassam, 2014). Hal ini berarti frekuensi rapat sesuai dengan peraturan POJK No 33/POJK.04/2014 akan berhubungan dengan kualitas dari laporan keuangan.

Sejalan dengan itu, hal ini memungkinkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*, seperti hasil penelitian dari Achmad (2012) dan Laksmna (2008). Dengan begitu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure*

2.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Voluntary Disclosure*

Teori keagenan memprediksi bahwa pembentukan komite audit akan mengurangi *agency cost* (Ho dan Wong, 2001) dan *information asymmetry* (Li, Mangena, dan Pike, 2012). Rapat komite audit merupakan struktur dan mekanisme kerja dari komite penunjang dewan komisaris, yaitu komite audit. Lazimnya komite audit melakukan pertemuan formal empat kali dalam setahun, dimana biasanya forum rapat tersebut dilakukan untuk membahas berbagai hal terkait; perincian pekerjaan audit, mendiskusikan hasil audit yang memerlukan tindakan lebih lanjut, serta menerima rekomendasi auditor terkait audit, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pengendalian manajemen (Lukviarman, 2016). Karamanou dan Vafeas (2005) menyatakan bahwa komite audit yang sering melakukan pertemuan biasanya cenderung lebih efektif dan juga memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pengawasan secara efektif atas kualitas informasi keuangan (*transparency*) yang disampaikan kepada pemegang saham.

Dengan penjelasan diatas, dapat dimungkinkan jika terdapat hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan *voluntary disclosure* yang sesuai dengan O'Sullivan, Percy, & Stewart (2008) dan Li, Mangena, dan Pike (2012) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Dengan begitu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure*

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Voluntary Disclosure*

Disamping komposisi dalam dewan direksi dan frekuensi rapat, proporsi dari kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi dalam praktik *disclosure* (Haniffa dan Cooke, 2002). Menurut teori keagenan, dalam lingkungan kepemilikan yang tidak terkonsentrasi, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya keagenan dan asimetri informasi, namun tidak dalam situasi kepemilikan yang lebih terkonsentrasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) pengelolaan perusahaan dibawah kepemilikan konsentrasi yang tinggi menimbulkan konflik antara pemegang saham besar dan kecil, bukan hanya antara manajemen dengan pemegang saham⁷. Selain itu, pemegang saham pengendali ini dapat memperkaya diri mereka melalui transaksi pihak terkait dimana keuntungan ditransfer ke perusahaan lain yang mereka kendalikan (Ho dan Wong, 2001). Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya keterbukaan (*transparency*) dalam pengambilan keputusan oleh pengurus perusahaan, karena tidak adanya kebutuhan akan hal itu. Akibatnya pemegang saham minoritas tidak memiliki informasi tentang kondisi perusahaan sebenarnya (Surya dan Yustiavandana, 2006:4)

Lemahnya penegakan hak kepemilikan merupakan penyebab utama dari kepemilikan perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, mereka akan sering menghadapi sistem hukum yang lemah, penegakan hukum yang buruk

⁷Ketika kontrol kepemilikan cukup tinggi untuk memastikan posisinya, manajemen memiliki dorongan untuk berperilaku melawan kepentingan pemegang saham yang lebih kecil karena kekuatan pemungutan suara yang kuat untuk menunjuk seseorang yang dipercayainya untuk menjadi CEO, direktur dan/ atau ketua dewan.

dan korupsi (Clasessens dan Fan, 2002). Oleh karena itu, keluarga pengendali memungkinkan untuk memiliki akses informasi lebih besar, yang mengarah pada rendahnya keluasan pengungkapan informasi kepada pihak luar (Ho dan Wong, 2001).

Dengan begitu, adanya kepemilikan keluarga memberikan pengaruh negatif terhadap *voluntary disclosure* (Akhtaruddin dkk., 2009; Ho dan Wong, 2001; Haniffa dan Cooke, 2002). Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap *Voluntary Disclosure*

2.4 Karakteristik Perusahaan

Lang dan Lundolm (1993) dalam Wijayanti (2013) menggolongkan Karakteristik Perusahaan dalam 3 pendekatan. Karakteristik Perusahaan tersebut berkaitan dengan struktur, kinerja dan pasar. Struktur perusahaan meliputi ukuran perusahaan dan *leverage*. Kinerja perusahaan meliputi likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan. Namun demikian, dalam penelitian ini tidak faktor akan digunakan dalam penelitian, hanya dua variabel saja yang akan digunakan, antara lain ukuran perusahaan dan tipe industri.

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategorikal yaitu perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan besar (*large firm*). Jika dihubungkan dengan teori keagenan, untuk ukuran perusahaan kecil, maka biaya keagenan juga akan menurun. Oleh karena

itu, untuk menghindari konflik keagenan tersebut, perusahaan yang lebih besar dapat mengungkapkan informasi lebih banyak. Penjelasan, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyiapkan dan mengungkapkan informasi dan hal itu menjadi beban keuangan bagi perusahaan kecil, namun tidak untuk perusahaan besar (Abeywardana dan Pdanitharathna, 2016).

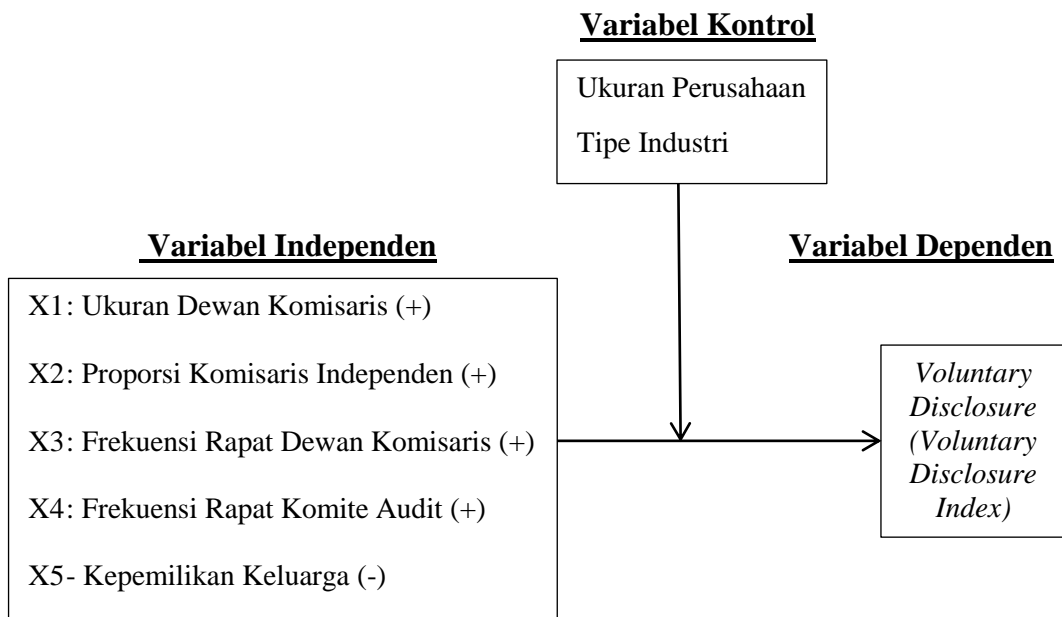
b. Tipe Industri

Roberts (1992) dalam Anggraini (2006) memproksikan tipe industri menjadi 2 (dua) kategorikal, yaitu tipe industri *high profile* dan *low profile*. Perusahaan dengan tipe industri *high profile* akan memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dengan tipe industri yang *low profile*. Utomo (2000) dalam Sembiring (2005) mendefinisikan tipe industri *high profile* sebagai tipe industri yang memiliki karakteristik *consumer visibility*, resiko politik yang tinggi atau kompetisi yang tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggung jawabannya kepada masyarakat, karena hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dan akan mempengaruhi tingkat penjualan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2012-2015⁸. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)⁹ adalah keseluruhan saham syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Daftar Efek Syariah (DES). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman perubahan komposisi saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia setiap dua kali dalam setahun, yakni pada periode Juni-November dan periode Desember-Mei. Populasi perusahaan yang dijadikan bahan penelitian mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dan di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2012-2015 tidak *delist* (keluar) dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode penelitian dari tahun 2012-2015 .
2. Perusahaan telah menyajikan laporan tahunan per 31 Desember untuk tahun 2012-2015 yang telah diaudit serta memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap.
3. Perusahaan yang menyediakan informasi terkait penelitian.

⁸ Pertimbangan memilih semua perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) karena Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

⁹ Dimana perusahaan ini terdiri dari perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada Peraturan Bapepam & LK (OJK) No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, pasal 1.b.7(SahamOK, 2017).

Dengan menggunakan karakteristik diatas, perusahaan yang konsisten terdaftar dalam ISSI dari tahun 2012-2015 adalah sebanyak 191¹⁰ perusahaan, dengan begitu 191 perusahaan tersebut merupakan populasi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sampel, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan penghitungan menurut Hair dkk. (2010) yaitu menggunakan penghitungan minimal sampel yaitu 5 dikali jumlah keseluruhan variabel. Sehingga jumlah sampel yang didapat yaitu 40 perusahaan yang berasal dari 5 dikali 8 (1 variabel dependen, 5 variabel independen dan 2 variabel kontrol). Untuk menambah tingkat kevalidan, maka jumlah sampel ditambah menjadi 50 perusahaan per tahun penelitian. Selanjutnya 50 perusahaan tersebut ditentukan dengan menggunakan *simple random sampling*. Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2015 (4 tahun), maka jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini menjadi 200.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama tahun 2012-2015, kecuali untuk variabel kepemilikan keluarga. Data untuk kepemilikan, keterlibatan pemilik di dewan direksi dan dewan komisaris, dan afiliasi keluarga diperoleh tidak hanya berasal dari laporan tahunan¹¹ 2012-2015 namun juga berasal dari sumber lain seperti

¹⁰ Eliminasi populasi sebesar 191 perusahaan ada pada lampiran I.

¹¹ Dengan menggunakan data tersebut, peneliti akan mengidentifikasi beberapa tipe dari pemegang saham pengendali yang tercatat di BEI, yaitu pemerintah, entitas asing, institusi keuangan, perorangan, perusahaan tidak terdaftar, dan perusahaan lain yang telah listing. Ketika perusahaan dikendalikan oleh perusahaan lain yang terdaftar di BEI, peneliti melacak pemegang saham utama (pemegang saham pengendali perusahaan induk) (Darmadi and Sodikin, 2013).

prospektus perusahaan¹² dan sumber internet. Untuk menentukan perusahaan tersebut masuk dalam jenis perusahaan keluarga atau tidak, langkah yang dilakukan adalah (Sumarsono, 2014):

1. Identifikasi nama keluarga pengendali dengan pencarian nama, adanya pengulangan nama yang ada pada nama pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris pada laporan tahunan¹³.
2. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak terdaftar (dimiliki secara tidak langsung) dapat ditelusuri melalui propektus perusahaan yang dipublikasikan.
3. Prosedur tersebut seharusnya tidak dilakukan secara berurutan namun ada saling *cross-check*. Jika ada nama keluarga pengendali yang masih meragukan, nama tersebut dapat dilacak melalui *history of ownership* dalam prospektus perusahaan. Penulis juga memeriksa nama keluarga potensial melalui berbagai sumber di internet yang mungkin tidak didasarkan pada hubungan nama.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 *Voluntary Disclosure*

Voluntary disclosure dihitung dengan menggunakan item yang

¹²Prospektus perusahaan tidak hanya mencakup nama dan kepemilikan langsung, namun, untuk membantu menjelaskan hubungan antara kelompok bisnis dan anggota keluarga, juga mengungkapkan: sejarah perusahaan dan pemegang sahamnya; susunan dewan komisaris dan direksi; tim manajemen utama; dan transaksi pihak terkait.

¹³Identifikasi hubungan keluarga yang didasarkan pada nama lengkap mungkin tidak dapat memberikan hasil yang sangat baik dalam proses data mining. Namun, metode ini masih tetap relevan dan bisa dibenarkan mengingat kekurangannya peraturan tentang pengungkapan di Indonesia (Tabalujan, 2002).

dimodifikasi serta dikembangkan dari *checklist* yang dibuat oleh Khomsiah (2005) dengan modifikasi dalam Nugraheni dan Anuar (2014) serta menambahkan *disclosure index* yang digunakan pada penelitian Akhtaruddin dan Haron (2010). *Disclosure index* tersebut lalu disesuaikan dengan peraturan pengungkapan terbaru menurut peneliti yaitu dengan cara:

1. Identifikasi 30 item *voluntary disclosure* hasil modifikasi Nugraheni dan Anuar (2014) dan 64 item *voluntary disclosure* dari Akhtaruddin dan Haron (2010).
2. Mengeliminasi item yang termasuk *mandatory* sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012¹⁴. Prosedur ini mengakibatkan item *voluntary disclosure* tersisa 35 item.

Item informasi diberi skor numerik berdasarkan basis dikotomi. Menurut pendekatan *unweighted disclosure*, perusahaan diberi nilai “1” untuk item yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan “0” jika tidak diungkapkan. Indeks *voluntary disclosure* (VDX) kemudian dihitung untuk setiap perusahaan yang menjadi sampel sebagai rasio dari total skor pengungkapan terhadap kemungkinan pengungkapan maksimum oleh perusahaan. Indeks pengungkapan untuk masing-masing perusahaan kemudian dinyatakan sebagai persentase (Akhtaruddin dkk. 2009; Nugraheni dan Anuar 2014; Rouf 2010).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah keseluruhan anggota dewan yang ada di perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah

¹⁴ Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 berisi tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

keseluruhan dewan komisaris di dalam perusahaan (Akhtaruddin dkk. 2009; Allegrini dan Greco 2011; Rouf 2011).

3.3.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen merupakan jumlah dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan persentase dewan komisaris independen didalam dewan (Cahaya dkk., 2012; Al-Janadi, Rahman, and Alazzani 2016; Chen and Jaggi 2000).

3.3.2.4 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan dewan komisaris pada tahun penelitian (Achamd, 2012; Laksamana, 2008).

3.3.2.2 Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan komite audit pada tahun penelitian (Li, Mangena, and Pike 2012; O'Sullivan, Percy, and Stewart 2008; Kamel dkk., 2014).

3.3.2.5 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang didominasi oleh keluarga dari pemilik perusahaan. Kepemilikan keluarga diukur dengan basis dikotomi, yaitu diberi nilai "1" jika terdapat kepemilikan keluarga dan "0" jika sebaliknya (Ho dan Wong 2001; Akhtaruddin dkk. 2009; Alfraih dan Almutawa 2017).

3.3.3 Variabel Kontrol

3.3.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan struktur kepemilikan yang dimilikinya. Ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aset perusahaan (Rouf 2011; Haniffa dan Cooke 2002; Akhtaruddin dkk. 2009; Allegrini dan Greco 2011; Ho dan Wong 2001).

3.3.3.2 Tipe Industri

Tipe industri adalah pengklasifikasian perusahaan menurut jenis usaha yang dijalankan. Tipe industri diukur dengan basis dikotomi, yaitu diberi nilai “1” jika termasuk dalam *high profile industry* dan “0” jika termasuk dalam *low profile industry* (Cahaya dkk., 2012). Konsisten dengan Nurhayati (2005) dalam Cahaya dkk., (2012) BEI secara resmi mengklasifikasikan industri yang terdiri dari sembilan industri, direklasifikasikan ke dalam pengkodean rendah-tinggi. Tujuh industri yaitu agrikultur, tambang, industri dasar dan bahan kimia, industri lain-lain, industri barang konsumsi, properti dan real estate, dan infrastruktur, utilitas dan transportasi diklasifikasikan dengan *high profile industry* sedangkan dua lainnya, keuangan dan perdagangan, jasa dan investasi diklasifikasikan dengan *low profile industry*.

Ringkasan pengukuran dan sumber informasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran dan Sumber Informasi Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Tipe data	Sumber informasi
Dependen			
<i>Voluntary Disclosure</i>	Jumlah items <i>voluntary disclosure</i> (Nugraheni and Anuar 2014; Akhtaruddin dkk. 2009)	Kontinu	Laporan Tahunan

Independen			
Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah keseluruhan dewan komisaris di dalam perusahaan (Akhtaruddin et al., 2009; Allegrini & Greco, 2011; Nugraheni & Anuar, 2014; Rouf, 2011)	Kontinu	Laporan Tahunan
Proporsi Dewan Komisaris Independen	Persentase dewan komisaris independen didalam dewan komisaris (Cahaya dkk., 2012; Al-Janadi, Rahman, and Alazzani 2016; Chen and Jaggi 2000)	Kontinu	Laporan Tahunan
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	Jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan dewan komisaris pada tahun penelitian (Achmad, 2012; Laksmana, 2008)	Kontinu	Laporan Tahunan
Frekuensi Rapat Komite Audit	Jumlah keseluruhan rapat yang dilasanakan komite audit pada tahun penelitian (Li, Mangena, and Pike 2012; O'Sullivan, Percy, and Stewart 2008; Kamel dkk., 2014)	Kontinu	Laporan Tahunan
Kepemilikan Keluarga	Nilai "1" jika terdapat kepemilikan keluarga dan "0" jika sebaliknya (Ho dan Wong 2001; Akhtaruddin dkk. 2009; Alfraih dan Almutawa 2017).	Kategorikal	Laporan Tahunan, Prospektus Perusahaan dan internet.
Kontrol			
Ukuran Perusahaan	Jumlah aset perusahaan (Rouf 2011; Haniffa dan Cooke 2002; Akhtaruddin dkk. 2009; Allegrini dan Greco 2011; Ho dan Wong 2001)	Kontinu	Laporan Tahunan
Tipe Industri	Nilai "1" jika termasuk dalam <i>high profile industry</i> dan "0" jika termasuk dalam <i>low profile industry</i> (Cahaya dkk., 2012)	Kategorikal	Laporan Tahunan

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pola hubungan antara variabel independen (Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga) dengan variabel dependen (*Voluntary Disclosure*) dan variabel kontrol (Ukuran Perusahaan dan Tipe Industri). Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik persamaan regresi

berganda (*multiple regression*), yaitu menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2011:7).

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai-nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2011:21).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, kemudian baru dilakukan uji hipotesis melalui uji-t untuk menentukan ketepatan model.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan *One-sample Kolmogorov-Smirnov*. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05; maka distribusi data normal.

2. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05; maka distribusi data tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam regresi adalah dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Menurut Ghozali (2011:105) nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson* (DW). Pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011:111) ada tidaknya autokorelasi.

Jika nilai *Durbin Watson* tidak dapat memberikan kesimpulan apakah data yang digunakan terbebas dari autokorelasi atau tidak, maka perlu dilakukan *RunTest*. Pengambilan keputusan didasarkan pada acak atau tidaknya data, apabila

bersifat acak maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak terkena autokorelasi. Menurut Ghozali (2011:120) acak atau tidaknya data didasarkan pada batasan sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas $\geq \alpha = 0,05$ maka observasi terjadi secara acak
2. Jika nilai probabilitas $\leq \alpha = 0,05$ maka observasi terjadi secara tidak acak.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji *Glejser*. Dimana menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011:142) uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig (2-tailed) $> 0,05$; maka tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.
2. Jika nilai sig (2-tailed) $< 0,05$; maka terjadi masalah Heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu profitabilitas, struktur aset, *growth*

opportunity, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap struktur modal sebagai variabel dependen. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y = *VDX*

α = Konstanta

β = Parameter koefisien variabel Independen

X1 = UK

X2 = PDKI

X3 = RAPATDK

X4 = RAPATKA

X5 = KK

e = Error

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien Determinasi (Uji R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:99).

Kriteria pengujian :

1. Jika nilai *p value* $< \alpha$, H_0 ditolak dan H_a gagal ditolak, hal ini berarti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai *p value* $> \alpha$, H_0 gagal ditolak dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang ada pada Bab III sebelumnya, teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling* yang dibantu dengan program SPSS 21 untuk menentukan 50¹⁵ sampel secara acak dari 191 populasi perusahaan yang terdaftar dalam ISSI pada tahun 2012-2015. Pada penentuan 50 sampel dengan *simple random sampling*, terdapat 13 perusahaan yang tidak mengungkapkan frekuensi rapat komite audit dalam laporan tahunan. Kemudian, peneliti mengganti ke 13 sampel perusahaan tersebut secara acak. Hasil *simple random sampling* 1 dan ke 2 dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Dari ke 50 sampel yang telah dikumpulkan datanya ke dalam excel, kemudian dilakukan pemeriksaan atau verifikasi data oleh pihak independen dengan mengambil data sebanyak 10% dari total sampel (5 perusahaan). Tingkat validitas data setelah dilakukannya pemeriksaan atau verifikasi data berada pada angka 98.83% (validitas yang dapat diterima jika tingkat kesalahan berada dibawah angka 10%). Proses pemeriksaan atau verifikasi data penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.

¹⁵ Menurut Hair dkk. (2010) jumlah minimal sampel adalah 5 kali dari jumlah indikator. Dengan begitu penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 5 kali 8 (1 variabel dependen, 5 variabel independen dan 2 variabel kontrol). Dengan begitu didapat hasil 40 perusahaan. Untuk menambah tingkat kevalidan, maka jumlah sampel ditambah menjadi 50 perusahaan per tahun penelitian. Dikarenakan tahun penelitian adalah 4 tahun, maka jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi 200. Hasil *Simple Random Sampling* terdapat pada Lampiran 2.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada karakteristik dari variabel independen (ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit dan kepemilikan keluarga), karakteristik dari variabel kontrol (ukuran perusahaan dan tipe industri), dan karakteristik dari variabel independen (*voluntary disclosure*).

Diskusi tentang analisis deskriptif dari *voluntary disclosure* digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam ISSI secara sukarela untuk memberikan informasi *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan mereka.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen diuraikan menggunakan data kontinu atau kategorikal¹⁶. Penjelasan mengenai karakteristik setiap variabel independen akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1.1 Karakteristik Variabel Kontinu

Tabel 4.1 akan menunjukkan kesimpulan dari karakteristik deskriptif variabel kontinu yang bernama ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit.

¹⁶ Karakteristik data dapat dilihat pada tabel 3.1 halaman 54.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Varibel Kontinu 2012-2015

Variabel	Minimum	Maksimum	Median	Rata-rata	SD
Ukuran Dewan Komisaris (Jumlah Anggota)	2	12	5	5,01	1,8835
Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)	16,67	60	33,33	38,24	0,0789
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Jumlah Pertemuan)	1	24	4	5,69	3,9853
Frekuensi Rapat Komite Audit (Jumlah Pertemuan)	1	57	4	8,76	9,7826
Ukuran Perusahaan (Jutaan Rupiah)	20.937	245.435.000	4.197.292	17.763.918,24	37.962.673,36

Sumber : Data Output SPSS diolah

Dari hasil analisis deskriptif pada table diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Untuk variabel ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan tersebut, dimana perusahaan dengan jumlah dewan komisaris terendah yaitu PT. Jaya Pari Steel, Tbk., PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. dan PT. Star Petrochem, Tbk. memiliki dewan komisaris hanya 2 orang. Nilai rata-rata sebanyak 5,01 atau 5 orang, menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata memiliki dewan komisaris melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam POJK No 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat (1) tentang keanggotaan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten¹⁷ serta UUPT No 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat (5) Perseroan Terbuka (PT) wajib memiliki paling sedikitnya dua (2) anggota dewan komisaris.¹⁸

¹⁷ Lihat penjalan POJK No 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat (1) bagian Bab II Hal. 25

¹⁸UU PT No 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau berbentuk Perseroan Terbuka (PT) wajib memiliki paling sedikitnya dua (2) anggota dewan komisaris

Proporsi ukuran dewan komisaris independen diukur dengan persentase dari komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Nilai terendah yaitu 16,67% dimiliki oleh PT. Intiland Development. Hal ini menunjukkan, bahwa perusahaan tersebut belum memenuhi ketentuan minimal jumlah dewan independen yang disyaratkan dalam POJK No 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat (3) yaitu jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Rata-rata proporsi dewan komisaris independen di Indonesia mengalami fluktuasi, yaitu 39,06% (2012), 37,96% (2013), 37,61% (2014), 38,34% (2015) dan rata-rata keseluruhan yaitu 38,24% dengan nilai median 33,33%. Hasil ini dinilai masih konsisten dengan negara berkembang lainnya, dimana menurut Tower, Achmad, Rusmin, dan Neilson (2008) menyatakan bahwa persentase dewan komisaris independen dan anggota audit komite yang independen di negara berkembang adalah dibawah 50%. Rendahnya nilai tersebut disinyalir dikarenakan bahwa kebanyakan perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga (Tower, Achmad, Rusmin, dan Neilson, 2008).

Berikutnya variabel frekuensi rapat dewan komisaris memiliki rata-rata sebesar 5,69 atau 6 kali, dengan nilai minimum 1 kali dan nilai maksimum 24 kali serta standar deviasi 3,9853. Dapat disimpulkan bahwa setiap sampel perusahaan telah melakukan rapat dewan komisaris sebanyak 6 kali dalam setahun. Sedangkan variabel frekuensi rapat komite audit memiliki rata-rata sebesar 8,76 atau 9 kali, dengan nilai minimum 1 kali dan nilai maksimum 57 kali serta standar

deviasi 9,7826. Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan sampel telah melakukan rapat komite audit sebanyak 9 kali dalam setahun.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, yang diukur dengan total aset, memiliki jangkauan yang sangat luas. Perusahaan dengan sampel terkecil (PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk.) memiliki total aset sebesar Rp 20.937.000.000, sedangkan perusahaan sampel terbesar (PT Astra International, Tbk.) memiliki total aset sebesar Rp 245.435.000.000.000. Nilai rata-rata sebesar Rp 17.763.918.000 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar didalam Indek Saham Syariah Indonesia memiliki total aset sekitar 17,763 miliar Rupiah.

Tabel 4.2

Hasil Rata-Rata Varibel Kontinu Tiap Tahun Penelitian

Variabel	2012	2013	2014	2015
Ukuran Dewan Komisaris (Jumlah Anggota)	5	4,98	5,04	5,02
Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)	39,06	38,63	37,61	38,34
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Jumlah Pertemuan)	5,72	5,44	5,82	5,78
Frekuensi Rapat Komite Audit (Jumlah Pertemuan)	8,76	8,22	9,28	8,78
Ukuran Perusahaan (Jutaan Rupiah)	13.993.573	18.042.243	18938.432	20.977.614

Sumber : Data Output SPSS diolah

4.2.1.2 Karakteristik Variabel Kategorikal

Tabel 4.3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kategorikal

Variabel	Pengukuran	Persentase
Kepemilikan Keluarga	1: Jika terdapat kepemilikan keluarga	44
	0: Jika tidak terdapat kepemilikan keluarga	56
Tipe Industri	1: Jika termasuk dalam " <i>high profile</i> "	78
	0: Jika termasuk dalam " <i>low profile</i> "	22

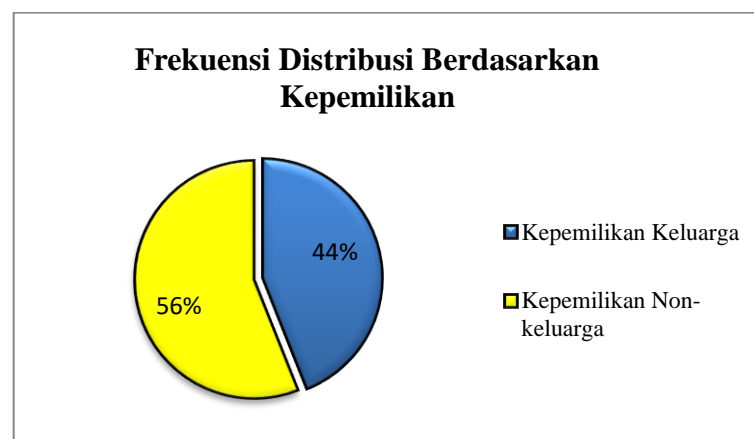
Sumber : Data Output SPSS diolah

Terdapat dua variabel independen yang diklasifikasikan menjadi variabel kategorikal, yaitu kepemilikan keluarga dan tipe industri. Variabel kepemilikan keluarga dan tipe industri tersebut pada dasarnya adalah dikotomi dan karakteristiknya akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1.2.1 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan skor 0 dan skor 1 sesuai dengan Bab III. Kepemilikan keluarga ditunjukkan dengan nilai “1” jika terdapat kepemilikan keluarga dan “0” jika sebaliknya (Ho dan Wong 2001; Akhtaruddin dkk. 2009; Alfraih dan Almutawa 2017). Gambar 4.1 menunjukkan persentase kepemilikan keluarga perusahaan sampel dalam penelitian ini.

Gambar 4.1
Diagram Variabel Kepemilikan Keluarga



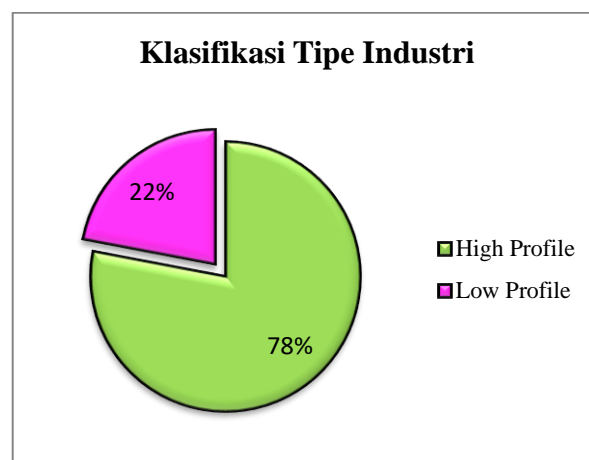
Dari gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kepemilikan keluarga (nilai 1) sebesar 44% sedangkan perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan keluarga (nilai 0) adalah sebesar 56% dari total 50 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, dari 50

perusahaan, perusahaan yang berkepemilikan keluarga ada 22 perusahaan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari Achmad (2007) dan Achmad (2012) nilai ini masih rendah jika dibandingkan dengan hasil yang ditemukan mereka, yakni 62% ditahun 2012 dan 60% ditahun 2007. Rendahnya kepemilikan keluarga di Indonesia ini disinyalir dikarenakan hanya menggunakan sampel perusahaan sebanyak 50.

4.2.1.2.2 Tipe Industri

Seperti kepemilikan keluarga, pengukuran variabel tipe industri untuk perusahaan *high profile* (1) dan untuk variabel *low profile* (0). Hasil analisis deskriptif variabel tipe industri adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Diagram Variabel Tipe Industri



Dari gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategorikal *high profile* (nilai 1) sebesar 39 perusahaan atau 78% sedangkan perusahaan yang termasuk *low profile* (nilai 0) adalah sebesar 11 perusahaan atau 22% dari total 75 perusahaan. Tabel 4.4 menunjukkan klasifikasi industri perusahaan sampel berdasarkan *IDX Fact Book*.

Tabel 4.4
Distribusi Perusahaan Berdasarkan Klasifikasi Industri Dari BEI

IDX Code	Klasifikasi Berdasarkan IDX	Tipe Industri	Tipe Industri	
			Jumlah	Persentase
1	<i>Agriculture</i>	<i>High</i>	1	2
2	<i>Mining</i>	<i>High</i>	6	12
3	<i>Basic Industry and Chemical</i>	<i>High</i>	10	20
4	<i>Miscellaneous Industry</i>	<i>High</i>	6	12
5	<i>Consumer Goods Industry</i>	<i>High</i>	2	4
6	<i>Property Real Estate and Building Construction</i>	<i>High</i>	12	24
7	<i>Infrastructure, Utilities, and Transportation</i>	<i>High</i>	2	4
8	<i>Finance</i>	<i>Low</i>	0	0
9	<i>Trade, Services, and Investment</i>	<i>Low</i>	11	22
	Jumlah		50	100

Sumber : Data Diolah, 2018

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Hasil pengungkapan *voluntary disclosure index* di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Rata-rata	SD
<i>Voluntary Disclosure Index (%)</i>	200	20	80	46,21	13,699

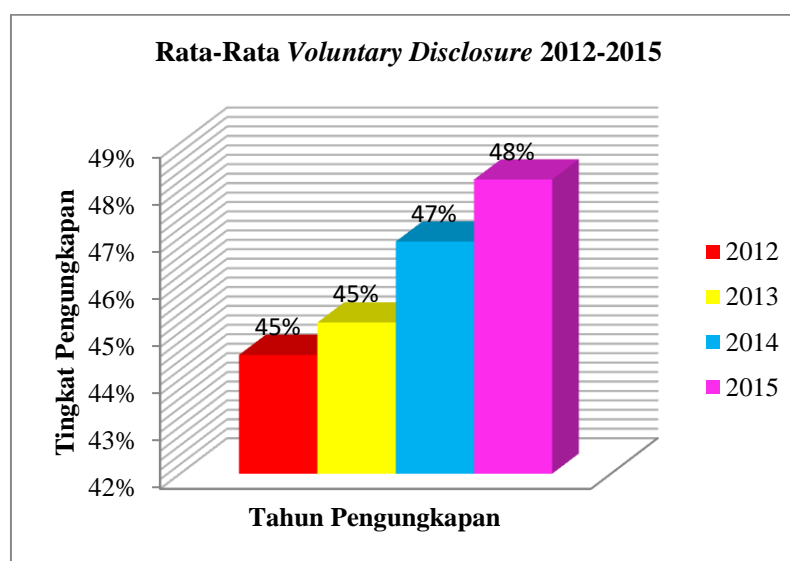
Sumber : Data Output SPSS diolah

Nilai rata-rata indeks *voluntary disclosure* tahun 2012-2015 adalah sebesar 0,4621 atau 46,21% dengan standar deviasi sebesar 13,699 %. Nilai rata-rata sebesar 46,21% dapat diartikan bahwa tingkat *voluntary disclosure* perusahaan di Indonesia hanya berkisar 46,21% Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat *voluntary disclosure* perusahaan-perusahaan di Indonesia masih relatif rendah, karena masih dibawah angka 50%. Namun hasil rata-rata jumlah item *voluntary disclosure* perusahaan tersebut relatif lebih banyak jika

dibandingkan dengan hasil penelitian dari Achmad (2012) 42% di Indonesia. Meskipun tingkat *voluntary disclosure* indeks pada perusahaan yang listing di ISSI rendah, hasil tersebut masih dinilai dalam posisi yang bagus jika dibandingkan dengan tingkat *voluntary disclosure* indeks di negara maju dan berkembang lainnya. Seperti rata-rata tingkat *voluntary disclosure* indeks di Malaysia 53,20% (Akhtaruddin dkk., 2009); Bangladesh 47,74 % (Rouf, 2010); Italia 35 % (Allegrini dan Greco, 2011); Arab Saudi 31,73 % (Al-Janadi, Rahman, dan Omar, 2013); Sri Lanka 49% (Abeywardana dan Panditharathna, 2016).

Gambar 4.3

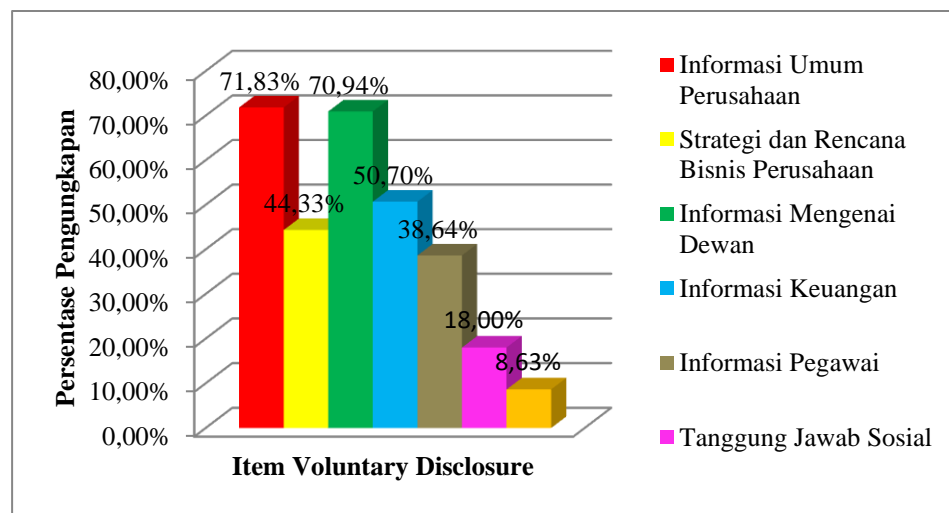
***Voluntary Disclosure* Perusahaan Sampel Tahun 2012-2015**



Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata tingkat *voluntary disclosure* indeks oleh 50 sampel perusahaan dari tahun 2012-2015. Dari empat tahun, pengungkapan terendah pada tahun 2012 (44,51%) sedangkan pengungkapan tertinggi pada tahun 2015 (48,23%). Nilai tingkat *voluntary disclosure* pada tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari rentang 44,51% sampai dengan 48,23%. Adanya peningkatan tersebut dimungkinkan perusahaan lebih sadar akan

pentingnya melakukan *voluntary disclosure* bagi peningkatan pertanggungjawaban perusahaan terhadap para *stakeholder*.

Gambar 4.4
Voluntary Disclosure Per Item Pengungkapan



Sumber: Data Diolah, 2018

Gambar 4.4 menunjukkan tingkat *voluntary disclosure* indeks per item pengungkapan selama tahun 2012-2015 pada perusahaan yang listing di ISSI. Tingkat pengungkapan terbesar adalah pada item “informasi umum perusahaan” dengan skor indeks pengungkapan sebesar 71,83%. Hal ini dimungkinkan karena informasi umum perusahaan sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena pengungkapan informasi umum perusahaan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen (item ini berisi tujuan perusahaan, laporan tahunan dual bahasa dan bursa saham yang dicatatkan).

Tingkat pengungkapan terbesar kedua adalah pada item mengenai “informasi mengenai dewan” dengan persentase sebesar 70,94%. Informasi mengenai dewan berhubungan dengan informasi mengenai 2 organ tata kelola

perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Tujuan dari tata kelola perusahaan yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua kepentingan semua pihak. Dalam informasi tersebut berisikan detail profil dari para dewan direksi dan dewan komisaris seperti nama beserta foto, umur, kewarganegaraan, direktorat lain yang dipegang dan pernyataan independensi bagi dewan komisaris independen. Informasi ini akan memungkinkan bagi para pembaca laporan tahunan untuk dapat melihat kualitas dan kompetensi dari para dewan direksi dan dewan komisaris itu sendiri.

Tingkat pengungkapan terbesar ketiga adalah pada item mengenai “informasi keuangan” dengan persentase sebesar 50,70%. Kemudian tingkat pengungkapan secara berurutan adalah item mengenai “strategi dan rencana bisnis perusahaan” dengan persentase sebesar 44,33%, mengenai “informasi pegawai” dengan persentase sebesar 38,64%, mengenai “tanggung jawab sosial” dengan persentase sebesar 18%, dan item *research and developmet* dengan persentase sebesar 8,63%. Perusahaan yang mengungkapkan lebih dari 50% ada 22 perusahaan seperti PT. Kalbe Farma, Tbk. dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Dimana kedua perusahaan tersebut hampir mengungkapkan ketujuh item *voluntary discosure*. Sedangkan perusahaan yang tingkat pengungkapannya rendah yaitu kurang dari 50% ada 28 perusahaan, seperti PT Multi Prima Sejahtera, Tbk. dan PT. Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk. Kedua perusahaan tersebut tidak melakukan pengungkapan pada item Informasi Pegawai, Tanggung Jawab Sosial dan R&D. Hal ini sangat disayangkan karena

item tersebut biasanya menjadi perhatian lebih oleh para *stakeholder* (Nugraheni dan Anuar, 2014).

4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (lihat rincian dari tes ini di Lampiran 5). Hasil tes menunjukkan bahwa asumsi normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi terpenuhi. Namun asumsi untuk homoskedastisitas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan, pada saat dilakukan uji glejser, variabel kepemilikan keluarga signifikan secara statistik mempengaruhi nilai absolut residual variabel *voluntary disclosure index*. Hal ini menandakan bahwa terdapat kemungkinan keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi.

Merujuk dalam Tabachnick & Fidell (2001: 80) heteroskedastisitas tidak memiliki pengaruh fatal bagi analisis regresi berganda. Tabachnick & Fidell (2001: 80) selanjutnya berpendapat bahwa, dalam analisis regresi berganda, heteroskedastisitas tidak membatalkan hasil meskipun itu dapat melemahkannya. Yang menjadi utama, yaitu jika asumsi normalitas terpenuhi dalam penelitian ini, hubungan antar variabel dapat dianggap homoskedastisitas (Tabachnick & Fidell, 2001: 79). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan hasil regresi yang pertama sebelum dilakukan transformasi¹⁹ untuk menguji hipotesis.

¹⁹ Penelitian ini berusaha untuk memperbaiki masalah heteroskedastisitas dengan mentransformasikan semua variable Kontinu menjadi logaritma natural. Namun hasil uji asumsi untuk heteroskedastisitas yang baru sama dengan hasil sebelumnya. Oleh karena itu, regresi asli

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi	t-hitung	p-value	Kesimpulan
Konstanta		0,313			
Ukuran Dewan Komisaris	+	0,026	4,585	0,000*	Signifikan
Proporsi komisaris Independen	+	-0,049	-0,436	0,663	Tidak Signifikan
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	+	0,002	0,735	0,463	Tidak Signifikan
Frekuensi Rapat Komite Audit	+	0,002	1,564	0,120	Tidak Signifikan
Kepemilikan Keluarga	-	0,002	0,134	0,893	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan (Kontrol)		$7,914 \cdot 10^{-11}$	0,269	0,788	
Tipe Industri (Kontrol)		0,008	0,356	0,722	
Model Summary :					
Adjusted R Square		: 0,168			
Standar Error Estimasi		: 0,12497			
Regresion Model		: 0,000*			

*Signifikan pada tingkat 1%

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai *intercept* konstanta sebesar 0,313. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya nilai *voluntary disclosure* akan sebesar 0,313.
2. Nilai koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris adalah sebesar 0,026. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ukuran dewan komisaris naik satu satuan, maka *voluntary disclosure* akan meningkat sebesar 0,026 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

digunakan dalam penelitian ini. Hasil regresi dengan semua variable kontinu yang telah ditransformasikan ada pada Lampiran V.

3. Nilai koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar -0,049. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel proporsi dewan komisaris independen naik satu satuan, maka *voluntary disclosure* akan menurun sebesar 0,049 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel frekuensi rapat dewan komisaris independen adalah sebesar 0,002. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel frekuensi rapat dewan komisaris independen naik satu satuan, maka *voluntary disclosure* akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel frekuensi rapat komite audit adalah sebesar 0,002. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel frekuensi komite audit naik satu satuan, maka *voluntary disclosure* akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
6. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan keluarga adalah sebesar 0,002. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kepemilikan keluarga naik satu satuan, maka *voluntary disclosure* akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah sebesar $7,194.10^{-11}$. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ukuran perusahaan naik satu satuan, maka pengungkapan sukarela akan meningkat sebesar $7,194.10^{-11}$ dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

8. Nilai koefisien regresi variabel tipe industri adalah sebesar 0,008. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel perusahaan tersebut merupakan perusahaan *high profile*, maka pengungkapan sukarela akan meningkat sebesar 0,008 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R²</i>	<i>Standard Error of the Estimate</i>
<i>Model of Voluntary Disclosure Complete Regression</i>	0,197	0,168	0,12497

Dari hasil analisis koefisien determinasi diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 16,8% dan sisanya sebesar 83,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5.2 Uji Statistik t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel IV.4. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pertama

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel ukuran dewan komisaris. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Dalam hasil uji tersebut menghasilkan *p-value* sebesar 0,00 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Selanjutnya, nilai koefisiennya berada pada nilai 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan antara ukuran dewan komisaris dan tingkat *voluntary disclosure* positif, sesuai arah yang diprediksikan pada hipotesis pertama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris lebih banyak memiliki tingkat *voluntary disclosure* yang tinggi.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel proporsi dewan komisaris independen. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa proporsi komisaris independen positif berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Dalam hasil uji tersebut menghasilkan *p-value* sebesar 0,663 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan begitu proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, sehingga hipotesis kedua ditolak dalam penelitian ini.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel frekuensi rapat dewan komisaris. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris positif berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Dalam hasil uji tersebut menghasilkan *p-value* sebesar 0,463 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan begitu frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, sehingga hipotesis ketiga ditolak dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel frekuensi rapat komite audit. Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit positif berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Dalam hasil uji tersebut menghasilkan *p-value* sebesar 0,120 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan begitu rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, sehingga hipotesis ketiga ditolak dalam penelitian ini.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kepemilikan keluarga. Hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan keluarga positif berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*. Dalam hasil uji tersebut menghasilkan *p-value* sebesar

0,893 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan begitu rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, sehingga hipotesis ketiga ditolak dalam penelitian ini.

6. Pengujian Variabel Kontrol

Pengujian terhadap variabel kontrol ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan dan tipe industri. Besarnya *p-value* sebesar 0,788 dan 0,722 pada tingkat $\alpha = 5\%$, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan begitu ukuran perusahaan dan tipe industri masing-masing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris akan meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan demikian pula sebaliknya.

Peran dari dewan komisaris selain untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, juga sebagai penjamin terlaksananya akuntabilitas (Surya dan Yustiavandana, 2006:137). Kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari dewan komisaris meningkat sebanyak penambahan dewan komisaris (Achmad, 2012). Besarnya jumlah dewan komisaris dapat mengurangi kemungkinan adanya asimetri informasi (Chen dan Jaggi, 2000), karena mereka dapat berkontribusi lebih untuk mengurangi konflik distribusi antara agen dan prinsipal dengan cara

pengawasan lebih terhadap manajemen dan juga meningkatkan transparansi untuk para *shareholder* (berbagai tipe *shareholder*) (Larmou & Vafeas, 2010 dalam Allegrini & Greco, 2011). Dengan lebih banyak dewan komisaris, pengalaman dan keahlian dewan juga akan meningkat, dan oleh karena itu, kebutuhan akan pengungkapan informasi juga akan meningkat (Akhtaruddin dkk. 2009).

Hasil penelitian ini sesuai penelitian (Achmad, 2012; Akhtaruddin dkk., 2009; Allegrini & Greco, 2011) yang membuktikan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keluasan *voluntary disclosure*.

4.6.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya komisaris independen tidak akan meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ho Dan Wong (2001), Rouf (2010), Achmad (2012) dan Allegrini dan Greco (2011) membuktikan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Pertama, tidak terbuktinya hipotesis kedua ini mengindikasikan bahwa teori keagenan yang digunakan untuk menghubungkan kedua variabel tersebut lemah (Achmad, 2012). Achmad (2012) menyatakan bahwa menghubungkan kedua variabel tersebut lebih baik menggunakan teori *stewardship* untuk diaplikasikan di Indonesia. Teori keagenan lebih tepat diaplikasikan di Indonesia untuk menghubungkan dalam hal ukuran dewan, intensitas pertemuan dewan dan

komite dewan. Yang kedua, proporsi dewan komisaris independen yang profesional lebih sering menahan untuk tidak mengungkapkan informasi lebih karena kekhawatiran mereka terhadap konsekuensi negatif yang akan mereka terima, seperti kehilangan reputasi dan kerugian kompetitif (Garcia-Sanchez dkk., 2014 dalam Zaman dkk., 2018). Penjelasan lain yang memungkinkan yaitu dewan komisaris independen lebih memilih untuk mematuhi dan melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan, tidak tertarik untuk mengungkapkan diluar itu (Zaini dkk., 2016) dikarenakan keberadaan mereka dimungkinkan hanya untuk memenuhi ketentuan POJK No 33/POJK.04/2014 yaitu wajib memiliki sekurangnya 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris (hasil rata-rata proporsi komisaris independen dalam penelitian ini 38%).

4.6.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah rapat dewan komisaris tidak akan meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Achmad (2012) dan Laksmana (2008) yang menemukan hasil bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Hasil ini membuktikan bahwa keberadaan rapat sepertinya kurang memberikan dampak besar terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Dimungkinkan adanya rapat dewan komisaris hanya untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memonitor manajemen dan menjaga reputasi mereka

sebagai pengambil keputusan saja. Menurut Greco (2011) frekuensi rapat merupakan proksi yang kurang sempurna untuk memonitor aktivitas apa saja yang dilakukan dalam perusahaan, dimana kita tidak mengetahui seberapa lama dan dimana rapat tersebut dilakukan. Selain itu, tidak adanya jaminan bahwa dewan komisaris memberikan pengawasan yang bernilai setelah melakukan pertemuan (Allegrini dan Greco, 2011).

4.6.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah rapat komite audit tidak akan meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil ini sesuai dengan dengan penelitian Kamel dkk. (2014) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*.

Dengan pertemuan rata-rata berkisar 8 kali per tahun (menurut peraturan POJK No. 55/POJK.04/2015, paling sedikit rapat dilakukan sekali dalam 3 bulan), menunjukkan bahwa pertemuan tersebut diekspektasikan akan berdampak pada *voluntary disclosure* perusahaan. Tidak berpengaruhnya frekuensi rapat komite audit menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan komite audit bukanlah kegiatan yang efektif dalam pengawasan proses pengungkapan (khususnya pengungkapan informasi keuangan perusahaan) (Felo, 2003 dalam Setiany dkk., 2017). Selanjutnya menurut Setiany dkk. (2017), tidak berpengaruhnya frekuensi rapat komite audit dapat diartikan bahwa jumlah rapat yang dilakukan bukan

merupakan faktor yang relevan yang digunakan untuk mengukur peran komite audit pada tingkat *voluntary disclosure*.

4.6.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kepemilikan keluarga tidak akan meningkatkan *voluntary disclosure* perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Akhtaruddin dkk., (2009); Ho dan Wong (2001); Haniffa dan Cooke (2002) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *voluntary disclosure*.

Tidak terbuktinya pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *voluntary disclosure* dimungkinkan bahwa adanya anggota keluarga dalam jajaran manajemen dan *shareholder* tidak terlalu menitik beratkan fokusnya terhadap *voluntary disclosure* (adanya kehati-hatian atas pengungkapan informasi oleh perusahaan keluarga). Perusahaan keluarga cenderung kurang terlibat dalam perilaku oportunistik (*voluntary disclosure*), mereka lebih ingin meneruskan perusahaan ke generasi selanjutnya dan lebih memperhatikan reputasi mereka (Alakra & Hutchinson, 2013), yaitu cukup dengan *mandatory disclosure*. Dengan lebih fokus pada *mandatory disclosure*, konten yang diungkapkan perusahaan lebih spesifik sesuai Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 dan mengurangi biaya untuk pengungkapan lebih tersebut. Selain itu, item yang diungkapkan baru sebatas perkiraan, dimungkinkan belum sesuai dengan informasi yang diinginkan oleh para *stakeholder* serta bisa menjadikan

ketidakefektifan isi konten laporan tahunan karena terlalu banyak informasi yang diungkapkan yang belum tentu informasi tersebut berguna bagi para *stakeholder*.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menganalisa laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dari tahun 2012-2015 dengan menggunakan teori keagenan sebagai kerangka teoritis. Kesimpulan dari hasil analisis pada BAB IV menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure*, sedangkan untuk proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dapat diartikan jika besarnya jumlah dari dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi perusahaan, dalam hal ini *voluntary disclosure*. Dimana seperti kasus yang telah diungkapkan pada BAB I sebelumnya, bahwa rendahnya transparansi (pengungkapan informasi) juga dikarenakan rendahnya jumlah dewan komisaris (independen) dan hal tersebut menyebabkan adanya jarak antara pihak yang memiliki informasi kuat dengan pihak yang memiliki informasi lemah. Dengan adanya kesesuaian jumlah dewan komisaris dengan POJK No

33/POJK.04/2014 memiliki dampak terhadap pemantauan proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

5.2.2 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar dalam ISSI ini dimungkinkan jika keberadaan komisaris independen lebih untuk melengkapi ketentuan dari POJK No 33/POJK.04/2014, wajib memiliki komisaris independen minimal 30%. Tidak hanya itu, keberadaan komisaris independen di Indonesia tidak dapat pula dikatakan sebagai pihak netral. Hal itu dikarenakan bahwa komisaris independen dipilih oleh pemegang saham, sedangkan mayoritas kepemilikan perusahaan di Indonesia adalah milik keluarga. Dengan begitu, dimungkinkan tetap dapat dikatakan bahwa keberadaan komisaris independen karena adanya faktor kepentingan pemilik perusahaan yang menyebabkan rendahnya tingkat transparansi dan *fairness*.

5.2.3 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dapat diartikan jika dimungkinkan para dewan komisaris dalam perusahaan yang terdaftar dalam ISSI kurang berkontribusi lebih dalam *voluntary disclosure* perusahaan. Ini dimungkinkan karena adanya ketidaksiapan para peserta rapat

karena anggota dewan komisaris yang memiliki jabatan ganda dalam industri yang berbeda, contohnya seperti SGRO dan SMSM. Hal itu mengakibatkan para anggota rapat tersebut memiliki waktu terbatas saat rapat berlangsung dan hanya fokus pada Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 saja. Tidak hanya itu, sebagai media komunikasi diantara anggota dewan komisaris, tren penyampaian informasi saat ini bisa menggunakan media sosial (seperti *group whatsapp*) disaat para anggota tidak bisa hadir dalam rapat. Mereka melakukan diskusi sebelum rapat dilaksanakan, sehingga pada saat rapat, hanya perwakilan anggota dewan komisaris saja yang mengesahkan hasil notulen yang didiskusikan. Hal ini dapat mengurangi fungsi anggota dewan komisaris sebagai sebagai pengawas, karena dapat terjadi benturan kepentingan melalui komunikasi tersebut.

5.2.4 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dapat diartikan jika dimungkinkan pada saat dilakukan rapat komite audit, para anggota komite audit perusahaan yang terdaftar dalam ISSI hanya melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012) sesuai dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 11 (sebelas), kurang membahas berkaitan dengan pengungkapan lebih atas informasi keuangan perusahaan. Dimungkinkan karena informasi keuangan telah

secara detail sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012.

5.2.5 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda Kepemilikan Keluarga Terhadap *Voluntary Disclosure*

Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hal ini dapat diartikan jika dimungkinkan adanya kepemilikan terkonsentrasi (keluarga) lebih memusatkan perhatian mereka dengan hanya melakukan pengungkapan sesuai Keputusan Ketua Bapepeam No.Kep-431/BL/2012 saja. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang dianggap individual dan rentan terhadap isu pelanggaran hak (hak antara pemegang saham minoritas dan mayoritas), sehingga mereka lebih berhati-hati untuk melakukan pengungkapan. Kehati-hatian tersebut dimaksudkan karena item informasi dalam *voluntary disclosure* belum atau masih wacana dalam item yang akan diwajibkan dalam peraturan selanjutnya. Tidak hanya itu, biaya yang akan dikeluarkan juga akan lebih tinggi jika perusahaan melakukan *voluntary disclosure*. Diharapkan dengan mereka melakukan hal tersebut, posisi mereka akan aman dan dapat mempertahankan posisi mereka dalam anggota dewan direksi, komisaris, manajemen maupun dalam jajaran pemegang saham.

5.2.6 Implikasi Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda Atribut *Corporate Governance* Terhadap *Voluntary Disclosure*

Secara keseluruhan, terbuktinya satu variabel *corporate governance* yang memiliki pengaruh terhadap *voluntary disclosure* menunjukkan bahwa bahwa teori keagenan hanya mampu menjelaskan fenomena hubungan antara atribut

corporate governance dan *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI secara parsial.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data sekunder untuk menentukan indeks *voluntary disclosure*, yaitu laporan tahunan perusahaan saja.
2. Hasil indeks *voluntary disclosure* yang digunakan belum bisa digunakan sebagai pembandingan hasil *voluntary disclosure* dengan negara berkembang lainnya dikarenakan item pengungkapan yang digunakan dalam penghitungan index diadopsi dari studi pengungkapan di Indonesia oleh Nugraheni dan Anuar (2014) serta Akhtaruddin dan Haron (2010).
3. Kurangnya sumber informasi mengenai perusahaan dengan kepemilikan keluarga seperti sumber informasi yang digunakan oleh Achmad (2007). Dimana dalam penelitian ini hanya melakukan penelusuran menggunakan informasi dari laporan tahunan, prospektus perusahaan dan sumber internet lainnya.
4. Hanya menggunakan penghitungan sampel minimal menurut Hair dkk. (2010), sehingga memungkinkan jumlah sampel tersebut mempengaruhi hasil penelitian.

5.4 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan dan hasil dari penelitian, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan juga sumber data pengungkapan selain laporan tahunan untuk mendapatkan informasi lebih lainnya seperti website perusahaan.
2. Menambahkan penyesuaian item *voluntary disclosure* antara negara yang satu dengan negara berkembang lainnya, hal itu dilakukan agar adanya peningkatan informasi yang harus diungkapkan yang belum masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang penyajian dan pengungkapan pelaporan emiten.
3. Menelusuri kembali kepemilikan keluarga dengan melakukan wawancara langsung seperti yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (2014) atau melakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi yang telah didapat PricewaterhouseCoopers (2014) agar mendapatkan hasil yang lebih valid.
4. Menggunakan alternatif pengukuran sampel lain seperti contohnya dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki yaitu 5%.
5. *Corporate governance* memiliki banyak proksi sehingga hasil penelitian biasanya tidak konsisten karena banyaknya pengukuran untuk setiap proksi. Untuk itu dimungkinkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan proksi tunggal *corporate governance*, yaitu berupa analisis faktor atau analisis efisiensi.

DAFTAR REFERENSI

- Abeywardana, N. L. E., & Panditharathna, K. M. (2016). The Extent and Determinants of Voluntary Disclosures in Annual Reports : Evidence from Banking and Finance Companies in Sri Lanka. *Accounting and Finance Research*, 5(4), 147–162. <https://doi.org/10.5430/afr.v5n4p147>
- Achmad, T. (2007). *Corporate Governance of Family Firms and Voluntary Disclosure : The Case of Indonesian Manufacturing Firms. Thesis.*
- Achmad, T. (2012). Dewan Komisaris Dan Transparansi : Teori Keagenan Atau Teori Stewardship ? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1), 1–12.
- Akhtaruddin, M., & Haron, H. (2010). Board Ownership , Audit Committees Effectiveness and Corporate Voluntary Disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18(1), 68–82. <https://doi.org/10.1108/13217341011046015>
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. (2009). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *JAMAR*, 7(1).
- Al-akra, M., & Hutchinson, P. (2013). Research in Accounting Regulation Family firm disclosure and accounting regulation reform in the Middle East : The case of Jordan. *Research in Accounting Regulation*, 25(1), 101–107. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2012.11.003>
- Al-Janadi, Y., Rahman, R. A., & Alazzani, A. (2016). Does Government Ownership Affect Corporate Governance and Corporate Disclosure ? Evidence from Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 31(8/9).
- Al-Janadi, Y., Rahman, R. A., & Omar, N. B. (2013). Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 25–35.
- Al-shammari, B. (2013). An Investigation of Voluntary Disclosure by Kuwaiti Shariah Compliant Companies. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 29(1), 21–41. <https://doi.org/10.1108/10264111311319213>
- Albassam, W. (2014). *Corporate Governance , Voluntary Disclosure and Financial Performance : An Empirical Analysis of Saudi Listed Firms Using*

A Mixed-Methods Research Design Waleed Mohammed Albassam BSc , MSc , SO-CPA Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree. Thesis.

- Albawwat, A. H., Yazis, M., & Basah, A. (2015). The Impact of Shariah Approved Companies on the Relationship between Corporate Governance Structure and Voluntary Disclosure of Interim Financial Reporting in Jordan. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(2), 66–85. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i2/1612>
- Alfraih, M., & Almutawa, A. (2017). Voluntary Disclosure and Corporate Governance: Empirical Evidence From Kuwait. *International Journal of Law and Management*, 59(2).
- Allegrini, M., & Greco, G. (2011). Corporate boards , audit committees and voluntary disclosure : evidence from Italian Listed Companies. *Journal Management Governance*, 17, 187–216. <https://doi.org/10.1007/s10997-011-9168-3>
- Alnasser, S. (2012). What Has Changed? The Development of Corporate Governance in Malaysia. *The Journal of Risk Finance*, 13(3), 269–276. <https://doi.org/10.1108/15265941211229271>
- Anggraini, R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Symposium Nasional Akuntansi IX*.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006a). Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies. *Corporate Governance*, 14(2), 107–125.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006b). Relationship Between Corporate Governance Attributes And Voluntary Disclosures In Annual Reports : The Kenyan Experience.
- Beritasatu.com. (2015). Dua Dimensi Ini Penghambat Praktik CG Emiten Indonesia. Retrieved December 5, 2017, from <http://www.beritasatu.com/emiten/328825-dua-dimensi-ini-penghambat->

praktik-cg-emiten-indonesia.html

- Bisnis.com. (2015). Rating Tata Kelola Perusahaan di Indonesia Terendah di Asean. Retrieved December 5, 2017, from <http://market.bisnis.com/read/20160928/192/587519/annual-report-awards-ini-33-perusahaan-terbaik-di-indonesia>
- Bursa Efek Indonesia. (2012a). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00146/BEI.PSH/05-2012.*
- Bursa Efek Indonesia. (2012b). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00630/BEI.PSH/11-2012.*
- Bursa Efek Indonesia. (2013a). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00169/BEI.PSH/05-2013.*
- Bursa Efek Indonesia. (2013b). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00676/BEI.PSH/11-2013.*
- Bursa Efek Indonesia. (2014a). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00376/BEI.OPP/06-2014.*
- Bursa Efek Indonesia. (2014b). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00891/BEI.OPP/12-2014.*
- Bursa Efek Indonesia. (2015). *Pengumuman Penambahan Komposisi Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia No. Peng-00350/BEI.OPP/05-2015.*
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., Tower, G., & Brown, A. (2012). Indonesia's Low Concern for Labor Issues. *Social Responsibility Journal*, 8(1), 114–132. <https://doi.org/10.1108/17471111211196610>
- Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong.

- Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4–5), 285–310.
[https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(00\)00015-6](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(00)00015-6)
- Clasessens, S., & Fan, J. (2002). Corporate Governance in Asia: A Survey. *International Review of Financ*, 3(2), 71–103.
- Darmadi, S., & Sodikin, A. (2013). Information Disclosure by Family-Controlled Firms The Role of Board Independence and Institutional Ownership. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 223–240. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2013-0009>
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325–345.
[https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(03\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(03)00037-1)
- Fama, E. E., & Jensen, M. C. (1998). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26 (2), 301-325.
<http://www.jstor.org/stable/725104>.
- Ghozali, M. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Kelima). Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Greco, G. (2011). Determinants of Board and Audit Committee Meeting Frequency: Evidence From Italian companies. *Managerial Auditing Journal*, 7(3), 1–14. [https://doi.org/10.1108/S1871-3173\(2013\)0000007004](https://doi.org/10.1108/S1871-3173(2013)0000007004)
- Hair, J.F., Black, W.C., & Anderson, R.E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2002). Culture , Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abac*, 38(3), 317–349.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information Asymmetry , Corporate Disclosure , and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature, 31, 405–440.
- Ho, P., & Taylor, G. (2006). Corporate Governance and Different Types of Voluntary Disclosure. *Pacific Accounting Review*, 25(1), 4–29.
<https://doi.org/10.1108/01140581311318940>
- Ho, S. S. M., & Wong, K. S. (2001). A Study of The Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure.

- Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 10, 139–156.
- IAI. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012* (1st ed.).
- InvestasiKontan.co.id. (2015). GCG Rendah, OJK Panggil 100 Emiten. Retrieved November 25, 2017, from <http://investasi.kontan.co.id/news/gcg-rendah-ojk-panggil-100-emiten/>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kamel, H., Ishak, Z., Aziah, N., & Manaf, A. (2014). The Impact of Audit Committee Characteristics on Corporate Voluntary Disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 486–492. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.106>
- Karajeh, A. I., Ibrahim, M. Y., & Lode, N. A. B. (2017). Impact of Shareholder Structure on Voluntary Disclosure in Malaysian Companies. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 9(1), 142–153.
- Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The Association Between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*, 43(3), 453–486. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2005.00177.x>
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Retrieved October 13, 2017, from www.governance-indonesia.or.id
- Laksmiana, I. (2008). Corporate Board Governance and Voluntary Disclosure of Executive Compensation Practices. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 1147–1182. <https://doi.org/10.1506/car.25.4.8>
- Li, J., Mangena, M., & Pike, R. (2012). The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure. *British Accounting Review*, 44(2), 98–110. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.003>
- Lukviarman, N. (2004). *Ownership structure and firm performance the case of Indonesia*. Curtin University of Technology.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. (R. N. Hamidawati, Ed.) (1st ed.). Solo:

Adicitra Intermedia.

- Martani, D. (2018). PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan. Retrieved January 4, 2018, from <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/martani/material/psak1penyajianlaporankeuangan.pdf>
- Morck, R., & Yeung, B. (2004). Family Control and the Rent-Seeking Society. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(4), 391–409.
- Nugraheni, P., & Anuar, H. A. (2014). Implications of Shariah on The Voluntary Disclosure of Indonesian Listed Companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(1), 76–98. <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2011-0018>
- O’Sullivan, M., Percy, M., & Stewart, J. (2008). Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and Their Association With Forward-Looking Information in The Annual Report. *Journal of Management and Governance*, 12(1), 5–35. <https://doi.org/10.1007/s10997-007-9039-0>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.” <http://www.ojk.go.id/en/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/OJK-Regulation-Concerning-The-Board-of-Directors-and-The-Board-of-Commissioners-of-Issuers-of-Public-Companies.aspx> (diakses pada 13 Oktober 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/ 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.” <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/documents/forms/allitems.aspx?rootfolder=/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-nomor-55.pojk.04.2015&folderctid=0x012000b9f773472dd83e409c36cc6e7de10022&view=%7B39901ed4-464d-4edc-b26b-66cee43cfce5%7D> (diakses pada 13 Oktober 2017).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/ PMK.06/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.”

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-88pmk062015> (diakses pada 13 Oktober 2017).

- PricewaterhouseCoopers. (2014). Survey Bisnis Keluarga 2014. Retrieved October 23, 2017, from <http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-family-business-survey-2014.pdf>
- Qu, W., Leung, P., & Cooper, B. (2013). A Study of Voluntary Disclosure of Listed Chinese Firms – a Stakeholder Perspective. *Managerial Auditing Journal*, 28(3), 261–294. <https://doi.org/10.1108/02686901311304376>
- RMOL. (2012). Kasus Bakrie dan Sumalindo di Pasar Modal Akibat Ketiadaan Transparansi. Retrieved December 17, 2017, from <http://ekbis.rmol.co/read/2012/12/17/90339/Kasus-Bakrie-dan-Sumalindo-di-Pasar-Modal-Akibat-Ketiadaan-Transparansi->
- Rouf, A. (2010). Corporate Characteristics , Governance Attributes and The Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh. *Asian Journal of Management Research*, 3795(2005), 166–183.
- Rouf, A. (2011). Corporate Characteristics , Governance Attributes and The Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh. *African Journal of Business Management*, 5(19), 7836–7845. <https://doi.org/10.5897/AJBM10.1180>
- SahamOK. (2017). Saham Syariah. Retrieved October 13, 2017, from <https://www.sahamok.com/saham-syariah/>
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Setiany, E., Hartoko, S., Suhardjanto, D., & Honggowati, S. (2017). Audit Committee Characteristics and Voluntary Financial Disclosure. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(3), 239–253.
- Shehata, N. F. (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. *Accounting and Finance Research*, 3(1), 18–26.

<https://doi.org/10.5430/afr.v3n1p18>

- Sumarsono, H. (2014). Family Governance and Firm Value: Evidence From Indonesia. *International Journal Economic Research*, 5(6), 8–26.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwardjono, S. (2011). *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). *Using Multivariate Statistics* (4th ed.). USA: Allyn & Bacon.
- Tabalujan, B. S. (2002). Family Capitalism and Corporate Governance of Family-controlled Listed Companies in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 25(August), 1–39. <https://doi.org/10.2139/ssrn.323948>
- Tower, G., Achmad, T., Rusmin, R., & Neilson, J. (2008). *Concentrated Family Ownership Structures Weakening Corporate Governance: A Developing Country Story. European Accounting Association Annual Conference.*
- Villalonga, B., & Amit, R. (2012). How Do Family Ownership , Control and Management Affect Firm Value? *Journal of Financial Economics*, 80(2006), 385–417. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005>
- Wardani, R. P. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14, 1–15. Retrieved from <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/18629/0>
- Zaini, M. S., Samkin, G., Sharma, U., & Davey, H. (2016). Journal of Accounting in Emerging Economies Article information: Voluntary disclosure in Emerging countries : A literature review Abstract. *Journal of Accounting in Emerging Economies*.
- Zaman, R., Bahadar, S., Kayani, U. N., Arslan, M., Zaman, R., Bahadar, S., Arslan, M. (2018). Emerging Economy Role of Media and Independent Directors in Corporate Transparency and Disclosure: Evidence From an Emerging Economy. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0042>

Zunker, T. (2011). *Determinants of the Voluntary Disclosure of Employee Information in Annual Reports : An Application of Stakeholder Theory.*

LAMPIRAN 1**Tabel Perusahaan yang Konsisten Terdaftar Dalam ISSI Tahun
2012-2015**

Periode	Perusahaan yang Konsisten	Keterangan
Jun-Nov 2012	269	Periode awal (Bursa Efek Indonesia [BEI], 2012a)
Des 2012-Mei 2013	(17)	(BEI, 2012b)
Jun-Nov 2013	(20)	(BEI, 2013a)
Des 2013-Mei 2014	(12)	(BEI, 2013b)
Jun-Nov 2014	(15)	(BEI, 2014)
Des 2014-Mei 2015	(7)	(BEI, 2014b)
Jun-Nov 2015	(7)	(BEI, 2015)
Jumlah	191	

LAMPIRAN 2

Tabel Hasil *Random Sampling* dengan Program SPSS

<i>Random Sampling Tahap Pertama</i>						Sumber Data Tidak Lengkap		<i>Random Sampling Tahap Kedua</i>					
No	Kode Saham	No	Kode Saham	No	Kode Saham	No	Kode Saham	No	Kode Saham	No	Kode Saham	No	Kode Saham
1	AALI	66	GEMS	131	PGAS	1	AALI	1	ACES	66	KBLI	131	TRST
2	ACES	67	GIAA	132	PJAA	2	ALKA	2	ADES	67	KBLM	132	TSPC
3	ADES	68	GJTL	133	PSAB	3	BRAM	3	ADHI	68	KBLV	133	ULTJ
4	ADHI	69	GMTD	134	PSDN	4	GPRA	4	AIMS	69	KDSI	134	UNIC
5	ADRO	70	GPRA	135	PTBA	5	JSPT	5	AISA	70	KICI	135	UNTR
6	AIMS	71	GREN	136	PTIS	6	KIAS	6	AKPI	71	KJJA	136	UNVR
7	AISA	72	GTBO	137	PTPP	7	LAMI	7	ANTM	72	KKGI	137	VOKS
8	AKPI	73	HRUM	138	PTSN	8	MICE	8	APLI	73	KOIN	138	WICO
9	AKRA	74	ICBP	139	PTSP	9	PTSN	9	APLN	74	LAPD	139	WIKA
10	ALDO	75	IGAR	140	PWON	10	RODA	10	ARNA	75	LION	140	WINS
11	ALKA	76	HKP	141	PYFA	11	SCBD	11	ARTI	76	LMPI	141	YPAS
12	AMFG	77	INAF	142	RDTX	12	SKLT	12	ASGR	77	LMSH		
13	ANTM	78	INCI	143	RICY	13	TIRA	13	ASII	78	LPCK		
14	APLI	79	INCO	144	RIGS	14	TMPO	14	AUTO	79	LPKR		
15	APLN	80	INDE	145	RODA	15	TRIL	15	BAYU	80	LSP		
16	ARNA	81	INDR	146	SCBD			16	BCIP	81	MAPI		
17	ARTI	82	INDS	147	SCCO			17	BEST	82	MBSS		
18	ASGR	83	INTD	148	SCMA			18	BISI	83	MBTO		
19	ASH	84	INTP	149	SDMU			19	BMSR	84	MDLN		
20	ASRI	85	ITMG	150	SDPC			20	BTON	85	MERK		
21	ATPK	86	JHD	151	SGRO			21	CASS	86	MIDI		
22	AUTO	87	JKON	152	SHID			22	CENT	87	MIFI		
23	BAPA	88	JPRS	153	SIAP			23	CITA	88	MKPI		
24	BATA	89	JRPT	154	SIMP			24	CLPI	89	MNCN		
25	BAYU	90	JSPT	155	SKLT			25	CNKO	90	MPPA		
26	BCIP	91	JTPE	156	SKYB			26	CPIN	91	MRAT		
27	BEST	92	KAFF	157	SMCB			27	CTRA	92	MTDL		
28	BISI	93	KBLI	158	SMGR			28	CTRS	93	MYOH		
29	BKSL	94	KBLM	159	SMRA			29	CTTH	94	MYOR		
30	BMSR	95	KBLV	160	SMRU			30	DART	95	PBRX		
31	BMTR	96	KDSI	161	SMSM			31	DEWA	96	PDES		
32	BRAM	97	KIAS	162	SONA			32	DGJK	97	PJAA		
33	BRPT	98	KICI	163	SQBB			33	DNET	98	PSAB		
34	BSDE	99	KJJA	164	SRAJ			34	DPNS	99	PSDN		

35	BTON	100	KKGI	165	SRSN
36	CASS	101	KLBF	166	SSIA
37	CENT	102	KOIN	167	STAR
38	CITA	103	LAMI	168	STTP
39	CLPI	104	LAPD	169	TCID
40	CNKO	105	LION	170	TFCO
41	COWL	106	LMPI	171	TGKA
42	CPIN	107	LMSH	172	TINS
43	CTBN	108	LPCK	173	TIRA
44	CTRA	109	LPIN	174	TLKM
45	CTRS	110	LPKR	175	TMPO
46	CTTH	111	LSIP	176	TOTL
47	DART	112	MAPI	177	TOTO
48	DEWA	113	MBSS	178	TPIA
49	DGJK	114	MBTO	179	TRIL
50	DILD	115	MDLN	180	TRST
51	DNET	116	MERK	181	TSPC
52	DPNS	117	MFMI	182	TURI
53	DSSA	118	MICE	183	ULTJ
54	DVLA	119	MIDI	184	UNIC
55	EKAD	120	MITI	185	UNTR
56	ELSA	121	MKPI	186	UNVR
57	EMDE	122	MNCN	187	VOKS
58	EPMT	123	MPPA	188	WICO
59	ERAA	124	MRAT	189	WIKA
60	FAST	125	MTDL	190	WINS
61	FISH	126	MTLA	191	YPAS
62	FMH	127	MYOH		
63	GDST	128	MYOR		
64	GDYR	129	PBRX		
65	GEMA	130	PDES		

35	DSSA	100	PTBA
36	DVLA	101	PTIS
37	EKAD	102	PTPP
38	ELSA	103	PTSP
39	EMDE	104	PWON
40	EPMT	105	PYFA
41	ERAA	106	RDTX
42	FISH	107	RICY
43	FMH	108	RIGS
44	GDST	109	SCCO
45	GDYR	110	SCMA
46	GIAA	111	SDMU
47	GJTL	112	SHHD
48	GMTD	113	SIAP
49	GREN	114	SIMP
50	GTBO	115	SKYB
51	ICBP	116	SMCB
52	IGAR	117	SMGR
53	HKP	118	SONA
54	INAF	119	SQBB
55	INCI	120	SRAJ
56	INDE	121	SRSN
57	INDR	122	SSIA
58	INDS	123	STAR
59	INTD	124	STTP
60	ITMG	125	TCID
61	JHD	126	TFCO
62	JKON	127	TINS
63	JRPT	128	TMPO
64	JTPE	129	TOTL
65	KAEF	130	TOTO

Keterangan:

= Sampel yang terpilih

= Sampel yang tidak terpilih

LAMPIRAN 3

Tabel Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.	35	MTLA	PT. Metropolitan Land, Tbk.
2	ADRO	PT. Adaro Energy, Tbk.	36	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.
3	AIMS	PT. Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk.	37	PTPP	PT. PP (Persero), Tbk.
4	AKRA	PT. AKR Corporindo, Tbk.	38	SDPC	PT. Millennium Pharmacon International, Tbk.
5	ALDO	PT. Alkindo Naratama, Tbk.	39	SGRO	PT. Sampoerna Agro, Tbk.
6	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass, Tbk.	40	SMRA	PT. Summarecon Agung, Tbk.
7	ASRI	PT. Alam Sutera Realty, Tbk.	41	SMSM	PT. Selamat Sempurna, Tbk.
8	ASII	PT. Astra International, Tbk.	42	STAR	PT. Star Petrochem, Tbk.
9	ATPK	PT. ATPK Resources, Tbk.	43	TGKA	PT. Tigaraksa Satria, Tbk.
10	BAPA	PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk.	44	TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
11	BATA	PT. Sepatu Bata, Tbk.	45	TPIA	PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk.
12	BKSL	PT. Sentul City, Tbk.	46	TURI	PT. Tunas Ridean, Tbk.
13	BMTR	PT. Global Mediacom, Tbk.	47	UNTR	PT. United Tractors, Tbk.
14	BRPT	PT. Barito Pacific, Tbk.	48	VOKS	PT. Voksel Electric, Tbk.
15	BSDE	PT. Bumi Serpong Damai, Tbk.	49	WICO	PT. Wicaksana Overseas International, Tbk.
16	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.	50	YPAS	PT. Yana Prima Hastapersada, Tbk.
17	COWL	PT. Cowell Development, Tbk.			
18	CTBN	PT. Citra Tubindo, Tbk.			
19	DILD	PT. Intiland Development, Tbk.			
20	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria, Tbk.			
21	ELSA	PT. Elnusa, Tbk.			
22	FAST	PT. Fast Food Indonesia, Tbk.			
23	GEMA	PT. Gema Grahasana, Tbk.			
24	GEMS	PT. Golden Energy Mines, Tbk.			
25	GDYR	PT. Goodyear Indonesia, Tbk.			
26	HRUM	PT. Harum Energy, Tbk.			
27	INCO	PT. Vale Indonesia, Tbk.			
28	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.			
29	JPRS	PT. Jaya Pari Steel, Tbk.			
30	KLBF	PT. Kalbe Farma, Tbk.			
31	LPCK	PT. Lippo Cikarang, Tbk.			
32	LPIN	PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk.			
33	MDLN	PT. Modernland Realty, Tbk.			
34	MFMI	PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk.			

LAMPIRAN 4

Verifikasi Data

Sebelum dilakukan analisis statistik, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan data. Yang mana verifikasi tersebut berisi verifikasi skor indeks pengungkapan, verifikasi data variabel independen yang diambil dari laporan tahunan, verifikasi data kepemilikan keluarga menggunakan sumber internet dan verifikasi data yang dimasukkan ke dalam file *M.S excel*. Keakuratan data merupakan bagian dari proses pembersihan data dari *error*, dan merupakan proses penting dalam analisis regresi berganda.

Langkah-langkah untuk memverifikasi data pada penelitian ini, antara lain:

1. Menetapkan pihak independen yang melakukan verifikasi data

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data merupakan mahasiswa pascasarjana yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar terjaga independensinya. Adapun identitas pihak yang melakukan verifikasi data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Identitas Pihak yang Melakukan Verifikasi Data

Nama	Rahma Maulidia, SE.
NIM	4214641
Fakultas	Magister Sains dan Doktor
Program	Magister Sains Akuntansi
Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada

2. Menetapkan sampel verifikasi data

Jumlah sampel verifikasi data pada penelitian ini ditetapkan 10% dari total 50 sampel perusahaan yang ada. Jadi, terdapat 5 perusahaan yang diverifikasi.

3. Verifikasi skor *voluntary disclosure*

Voluntary disclosure diukur berasal dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan selama 4 tahun dari tahun 2012-2015, sehingga terdapat 20 laporan tahunan perusahaan yang dilakukan verifikasi. *Voluntary disclosure* memiliki data point sebanyak 2.800, dan memiliki kesalahan 6 data point.

4. Verifikasi penghitungan rumus variabel independen

Penghitungan rumus UDK memiliki 1 komponen, yakni jumlah keseluruhan dewan komisaris. Verifikasi penghitungan rumus UDK memiliki 200 data poin dan bebas dari kesalahan. Penghitungan rumus PDKI memiliki 2 komponen, antara lain jumlah komisaris independen dan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Verifikasi penghitungan rumus PDKI memiliki 200 data poin, dan bebas dari kesalahan. Penghitungan rumus FRDK memiliki 1 komponen, yakni jumlah rapat keseluruhan dewan komisaris setiap tahun. Verifikasi penghitungan rumus FRDK memiliki 200 data poin, dan bebas dari kesalahan. Penghitungan rumus FRKA memiliki 1 komponen, yakni rapat keseluruhan komite audit setiap tahun. Verifikasi penghitungan rumus FRKA memiliki 200 data poin, dan bebas dari kesalahan. Penghitungan rumus KK memiliki 2 komponen, yakni kepemilikan saham oleh anggota keluarga dan keikutsertaan anggota keluarga

dalam jajaran anggota dewan direksi/ dewan komisaris. Verifikasi penghitungan rumus KK memiliki 200 data poin, dan bebas dari kesalahan.

5. Verifikasi rekapitulasi data yang dimasukkan ke program Microsoft Excel

Seluruh hasil data verifikasi dimasukkan ke program Microsoft Excel dan mendapatkan 41 kesalahan (error) dari total 3.500 data point yang diverifikasi. Sehingga, tingkat kesalahan yang ditemukan adalah 1,17%.

LAMPIRAN 5

Uji Asumsi Klasik Untuk Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 3 hasil uji asumsi klasik telah terpenuhi, normalitas, multikoloniaritas dan autokorelasi. Untuk asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada Bab IV, Tabachnick dan Fidell (2001:80) menyatakan bahwa masalah heteroskedastisitas ini tidak fatal dalam analisis regresi linear berganda. Tabachnick dan Fidell (2001:79) menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam analisis regresi linear berganda adalah asumsi normalitas, yang merupakan asumsi regresi linear berganda yang utama, harus terpenuhi. Seperti yang akan dibahas dibawah ini, uji asumsi dalam tesis ini mengungkapkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Dengan demikian, tesis ini memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk menggunakan hasil regresi untuk menguji hipotesis meskipun ada gejala heteroskedastisitas. Detail dari uji asumsi dijelaskan dibawah ini.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12274769
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,026
Kolmogorov-Smirnov Z		1,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,222

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,222. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai VIF, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 5.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
UK	0,680	1,471	Tidak ada multikolinieritas
PDKI	0,979	1,021	Tidak ada multikolinieritas
RAPATDK	0,651	1,536	Tidak ada multikolinieritas
RAPATKA	0,571	1,753	Tidak ada multikolinieritas
KK	0,981	1,019	Tidak ada multikolinieritas
SIZE	0,631	1,586	Tidak ada multikolinieritas
TIPE	0,906	1,104	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, dihasilkan nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi (Ghozali, 2011 hal. 107). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dapat dilihat menggunakan uji Durbin Watson. Hasil uji dinilai tidak memiliki autokorelasi jika nilai $du < d < 4 - du$. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Hasil Uji Autokorelasi

N	K = 5	Du	Durbin Watson
	DI		
200	1.718	1.820	2.220

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Dari hasil analisis uji autokorelasi di atas, dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 200 (n) serta jumlah variable independen 5 ($k=5$) dihasilkan nilai Durbin Watson 2.220 lebih besar dari batas atas (du) 1.820 dan kurang dari $4 - 1.820$ ($4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain (Ghozali, 2011 hal. 139). Selanjutnya jika varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji glejser dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dimana dalam uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarat, 2003 dalam Ghozali, 2011 hal. 142). Pada tabel dibawah ini dapat dilihat, setelah variabel di transformasi, terdapat variabel independen yaitu kepemilikan keluarga yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi nilai absolut dari residual nya dibawah *p-value* 0,05. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi berganda.

Tabel 5.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi Nilai Absolut dari Residual
Ukuran Dewan Komisaris	0,569
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,284
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	0,242
Frekuensi Rapat komite Audit	0,637
Kepemilikan Keluarga	0,007***
Ukuran Perusahaan	0,246
Tipe Industri	0,237

*** Signifikan pada tingkat 1%

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Telah dijelaskan sebelumnya pada Bab IV dan diawal lampiran V ini, keberadaan dari heteroskedatisitas memiliki pengaruh yang minim pada hasil regresi. Yang menjadi asumsi regresi utama yaitu normalitas terpenuhi dalam tesis ini. Seperti yang diungkapkan oleh Tabachnick & Fidell (2001:79) bahwa data tersebut masih bias dipertimbangkan dalam homoskedatisitas jika asumsi normalitas terpenuhi (dapat dilihat pada Bab IV). Didalam tesis ini, bagaimanapun juga tetap mencoba untuk mencari alternatif untuk mengatasi masalah heteroskedatisitas dengan mengubah semua variable kontinu, seperti penjelasan di bagian berikutnya.

5. Memperbaiki Model Untuk Mengurangi Heteroskedatisitas

Pada bagian ini akan menyajikan hasil tahapan regresi dari semua variabel Kontinu yang akan dirubah ke dalam logaritma natural (*voluntary disclosure index*, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit dan ukuran perusahaan). Transformasi dalam bentuk regresi logaritma seringkali mampu mengurangi heteroskedatisitas dibandingkan persamaan regresi sebelum ditransformasi (Ghozali, 2005 hal. 145). Tranformasi yang digunakana menggunakan logaritma natural, dimana menurut Ott dan Longnecker (2001) dalam Cahaya dkk. (2012) menyatakan bahwa metode standar yang digunakan untuk transformasi adalah logaritma natural. Uji asumsi regresi disajikan dan dibahas dalam lampiran ini. Tabel dibawah ini menampilkan hasil regresi setelah data di transformasi.

Tabel 5.5
Hasil Regresi Berganda Setelah Transformasi Logaritma Natural

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi	Signifikansi
Kepemilikan Keluarga	-	-0,064	0,092*
Ukuran Perusahaan (variable control)	+	0,081	0,000***
Model Summary :			
Adjusted R Square	: 0,312		
Standar Error Estimasi	: 0,26099		
Regresion Model	: 0,000***		

*** Signifikan pada tingkat 1%, *Signifikan pada tingkat 10%

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Dapat dilihat pada tabel diatas jika hasil regresi memiliki nilai signifikansi yang tinggi (*p-value* 0,000). Dengan nilai *adjusted R-square* 0,312, menunjukkan bahwa variasi dari *voluntary disclosure* dijelaskan oleh variasi dua prediktor yang signifikan (*p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%), yaitu kepemilikan keluarga. Ukuran perusahaan juga sangat signifikan (*p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%). Koefisien dari kedua variable ini sesuai dengan prediksi yang telah dijelaskan dalam Bab II yang berpendapat bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan keluarga dan *voluntary disclosure* (Hipotesis 5) dan terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dan *voluntary disclosure* (variabel kontrol). Variabel yang dihipotesiskan lainnya (ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris dan rapat komite audit) dan variabel kontrol (tipe industri) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil diatas berbeda dengan hasil temuan saat regresi pertama, dimana yang memiliki pengaruh signifikan dan sesuai arah prediksi hanyalah ukuran dewan komisaris (*p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%).

Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukkan nilai-nilai toleransi dan VIF yang signifikan dalam model regresi kedua. Tujuan dilakukan analisis ini untuk

memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Dapat dilihat bahwa nilai-nilai toleransi untuk semua variable prediktor signifikan dalam semua model regresi yaitu lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan multikolinearitas dalam analisis regresi ini.

Tabel 5.6
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Logaritma Natural

Variabel	Tolerance	VIF
Kepemilikan Keluarga	0,951	1,052
Ukuran Perusahaan (variabel kontrol)	0,404	2,474

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Selanjutnya untuk asumsi normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, pada hasil regresi dibawah ini menunjukkan bahwa *p-value* 0,524 diatas 0,05. Dengan begitu, asumsi normalitas dalam regresi kedua ini terpenuhi dimana hasil tersebut menegaskan bahwa data terdistribusi secara normal

Tabel 5.7
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi Logaritma Natural

		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,25635620
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,035
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		0,813
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,524

Sumber : Data Output SPSS, 2018

Selanjutnya untuk mengetahui apakah setelah data ditransformasi masih terdapat heteroskedastisitas atau tidak maka data diuji kembali dengan menggunakan uji glejser. Pada table dibawah, terdapat tiga prediktor yaitu ukuran

dewan komisaris, kepemilikan keluarga dan tipe industry yang secara statistik mempengaruhi nilai absolut residual. Hal ini dikarenakan *p-value* nya lebih kecil dari 5% untuk ukuran dewan komisaris dan tipe industri dan tingkat signifikansi 1% yaitu kepemilikan keluarga. Dengan demikian, memang terdapat heteroskedastisitas didalam model data yang telah diperbaiki ini. Detail nya akan ditampilkan pada table dibawah ini.

Tabel 5.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi Logaritma Natural

Variabel	Signifikansi Nilai Absolut dari Residual
Ukuran Dewan Komisaris	0,013**
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,240
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	0,795
Frekuensi Rapat komite Audit	0,747
Kepemilikan Keluarga	0,004***
Ukuran Perusahaan	0,140
Tipe Industri	0,036**

*** Signifikan pada tingkat 1%, **signifikan pada tingkat 5%, *Signifikan pada tingkat 10%
 Sumber : Data Output SPSS, 2018

Singkatnya, hasil transformasi untuk semua variabel Kontinu telah dilakukan untuk memperbaiki permasalahan heteroskedastisitas. Walaupun demikian, hasil tetap sama, tidak memperbaiki masalah. Terdapat heteroskedastisitas dalam data yang diregresi. Temuan diatas mengisyaratkan bahwa regresi dengan menggunakan data yang telah ditransformasi sama dengan regresi dengan menggunakan data yang asli (tanpa transformasi), kecuali untuk ukuran dewan komisaris dan tipe industri. Dengan masih adanya heteroskedastisitas dalam tesis ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan regresi dengan data asli (tanpa transformasi untuk disajikan dalam Bab IV).

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Hipotesis

Tabel Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,444 ^a	,197	,168	,12497	2,220

a. Predictors: (Constant), TIPE, RAPATDK, KK, PDKI, UK, SIZE, RAPATKA

b. Dependent Variable: TVDX

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas dapat diketahui nilai *Adjusted R²* sebesar 0,168. Artinya kelima variabel independen yang diregresikan hanya mampu menjawab 16,8% dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure*.

Tabel Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,313	,058		5,399	,000
UK	,026	,006	,360	4,585	,000
PDKI	-,049	,113	-,029	-,436	,663
RAPATDK	,002	,003	,059	,735	,463
RAPATKA	,002	,001	,134	1,564	,120
KK	,002	,018	,009	,134	,893
SIZE	7,914E-011	,000	,022	,269	,788
TIPE	,008	,022	,024	,356	,722

Berdasarkan tabel hasil regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan komisaris yang diprosikan dengan UK berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*; dimana *p-value* $0,00 < 0,05$. Sedangkan untuk keempat variabel independen lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, dimana *p value* untuk PDKI $0,663 >$

0,05; ρ value untuk RAPATDK 0,463 > 0,05; ρ value untuk RAPATKA 0,120 > 0,05; ρ value untuk KK 0,893 > 0,05.

LAMPIRAN 7

Tabel Indeks

<i>Voluntary Disclosure</i>		<i>Voluntary Disclosure</i>	
A	Informasi Umum Perusahaan	G	R & D
A.1	Pernyataan tujuan perseroan	G.1	Kebijakan perusahaan dalam R & D
A.2	Dual bahasa (bahasa inggris)	G.2	Diskusi tentang kegiatan R & D
A.3	Nama bursa efek dimana sahamnya dicatat	G.3	Diskusi biaya dalam R & D
B	Strategi & Rencana Perusahaan	G.4	Pengembangan produk baru
B.1	Penyataan menjalankan strategi		
B.2	Rencana investasi/ belanja modal		
B.3	Rencana bisnis		
C	Informasi Mengenai Dewan		
C.1	Nama dan foto Dewan Direksi		
C.2	Tanggal lahir/ umur Dewan Direksi		
C.3	Kewarganegaraan		
C.4	Direktorat lain yang dipegang Dewan Direksi		
C.5	Nama dan foto Dewan Komisaris		
C.6	Tanggal lahir/ umur Dewan Komisaris		
C.7	Kewarganegaraan		
C.8	Pernyataan independensi Dewan Komisaris Independen		
C.9	Direktorat lain yang dipegang Dewan Komisaris		
D	Informasi Keuangan		
D.1	Rasio keuangan penting lainnya		
D.2	Jumlah dan sumber pendapatan		
D.3	Laba Ditahan		
D.4	Rincian Aset tak berwujud		
D.5	Kebijakan mengenai amortisasi aset tak berwujud		
E	Informasi Pegawai		
E.1	Rincian karyawan berdasarkan pendidikan		
E.2	Rincian karyawan berdasarkan jabatan		
E.3	Kategorikal karyawan berdasarkan jenis kelamin		
E.4	Kebijakan rekrutmen		
E.5	Imbalan kerja		
E.6	Jumlah biaya investasi pelatihan		
E.7	Jumlah peserta pelatihan		
F	Tanggung Jawab Sosial		
F.1	Pengendalian lingkungan dan polusi		
F.2	Sponsor dalam pendidikan dan penelitian ilmiah		
F.3	Sponsor dalam kegiatan pemerintah		
F.4	Sertifikasi jaminan atas kualitas produk		

LAMPIRAN 8
Tabel Skoring Indeks Voluntary Disclosure
2012

Kode Saham	A			B			C									D					E							F				G				Total	Nilai Indeks			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4					
ADHI	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51
ADRO	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	0,51
AIMS	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,23
AKRA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22	0,63	
ALDO	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29	
AMFG	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
ASRI	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,40	
ASII	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	22	0,63
ATPK	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57	
BAPA	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
BATA	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
BKSL	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	
BMTR	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
BRPT	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,26	
BSDE	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60	
COWL	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	
CPIN	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,26	
CTBN	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,26	
DILD	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	

DVLA	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
ELSA	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57
FAST	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	22	0,63		
GDYR	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
GEMA	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43		
GEMS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,63		
HRUM	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
INCO	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
INTP	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
JPRS	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
KLBF	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	0,77	
LPCK	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34
LPIN	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,20	
MDLN	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
MFMI	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
MTLA	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,63	
PGAS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,69	
PTPP	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
SDPC	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,40	
SGRO	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	21	0,60		
SMRA	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,26		
SMSM	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17	0,49		
STAR	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29		
TGKA	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	
TLKM	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	24	0,69		

2013

Kode Saham	A			B			C									D					E							F				G				Total	Nilai Indeks			
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4					
ADHI	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51
ADRO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54
AIMS	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,23
AKRA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60
ALDO	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29
AMFG	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
ASRI	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
ASII	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	24	0,69
ATPK	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57
BAPA	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
BATA	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BKSL	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
BMTR	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
BRPT	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0,23	
BSDE	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,63	
COWL	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	
CPIN	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
CTBN	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14	0,40	
DILD	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
DVLA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
ELSA	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0,51		

2014

Kode Saham	A			B			C									D					E							F				G				Total	Nilai Indeks
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4		
ADHI	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57
ADRO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	17	0,49
AIMS	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,26	
AKRA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
ALDO	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29	
AMFG	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12	0,34	
ASRI	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
ASII	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	24	0,69	
ATPK	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51
BAPA	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BATA	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BKSL	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BMTR	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
BRPT	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,23	
BSDE	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60	
COWL	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
CPIN	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
CTBN	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	0,40	
DILD	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	16	0,46	
DVLA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37		

2015

Kode	A			B			C									D					E							F				G				Total	Nilai Indeks									
	Saha	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3			G4								
ADHI	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57				
ADRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,46		
AIMS	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
AKRA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,63	
ALDO	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29	
AMFG	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,40	
ASRI	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
ASII	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	23	0,66			
ATPK	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,49	
BAPA	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BATA	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,34	
BKSL	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
BMTR	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,49	
BRPT	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,23	
BSDE	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57
COWL	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,57	
CPIN	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,31	
CTBN	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,40	
DILD	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,51	
DVLA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,40	
ELSA	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60	

FAST	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	19	0,54
GDYR	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43
GEMA	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	0,46	
GEMS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0,66	
HRUM	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0,49	
INCO	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	22	0,63
INTP	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	20	0,57	
JPRS	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0,40	
KLBF	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	27	0,77	
LPCK	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
LPIN	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29	
MDLN	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
MFMI	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,29	
MTLA	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60	
PGAS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0,60	
PTPP	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0,66	
SDPC	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
SGRO	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	26	0,74		
SMRA	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12	0,34	
SMSM	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	19	0,54		
STAR	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,37	
TGKA	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	
TLKM	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	27	0,77		
TPIA	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,54	
TURI	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,43	

LAMPIRAN 9

Tabel Ukuran Dewan Komisaris 2012-2015

Kode Saham	Ukuran Dewan Komisaris			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	6	6	6	6
ADRO	6	5	5	5
AIMS	2	2	3	3
AKRA	3	3	3	4
ALDO	3	3	3	3
AMFG	6	6	6	6
ASII	12	10	11	11
ASRI	5	5	5	5
ATPK	3	3	3	3
BAPA	3	3	3	3
BATA	6	5	5	5
BKSL	7	7	5	6
BMTR	5	6	6	5
BRPT	5	3	3	3
BSDE	8	8	8	5
COWL	3	3	3	4
CPIN	5	6	6	5
CTBN	5	6	6	6
DILD	6	6	6	6
DVLA	7	7	7	6
ELSA	5	5	5	5
FAST	6	6	6	6
GDYR	3	3	3	3
GEMA	3	3	3	3
GEMS	6	5	5	6
HRUM	5	5	5	6
INCO	10	10	9	10
INTP	7	7	7	7
JPRS	2	2	2	3
KLBF	6	6	6	7
LPCK	6	7	9	8
LPIN	3	3	4	4
MDLN	4	5	5	5

MFMI	3	3	3	3
MTLA	6	6	6	5
PGAS	6	6	6	6
PTPP	6	5	5	6
SDPC	5	5	5	4
SGRO	4	4	4	4
SMRA	4	4	4	4
SMSM	3	3	3	3
STAR	2	2	2	2
TGKA	5	5	5	5
TLKM	5	6	7	7
TPIA	7	7	7	7
TURI	5	5	5	5
UNTR	6	7	7	6
VOKS	5	5	5	5
WICO	3	3	3	3
YPAS	3	3	3	3

LAMPIRAN 10

Tabel Persentase Proporsi Dewan Komisaris Independen

Kode Saham	Proporsi Dewan Komisaris Independen			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
ADRO	33,33%	40,00%	40,00%	40,00%
AIMS	50,00%	50,00%	33,33%	33,33%
AKRA	33,33%	33,33%	33,33%	25,00%
ALDO	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
AMFG	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
ASII	41,67%	20,00%	36,36%	36,36%
ASRI	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
ATPK	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
BAPA	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
BATA	33,33%	40,00%	40,00%	40,00%
BKSL	42,86%	42,86%	40,00%	50,00%
BMTR	40,00%	33,33%	33,33%	60,00%
BRPT	60,00%	33,33%	33,33%	33,33%
BSDE	37,50%	37,50%	37,50%	40,00%
COWL	33,33%	33,33%	33,33%	50,00%
CPIN	40,00%	33,33%	33,33%	40,00%
CTBN	40,00%	33,33%	33,33%	33,33%
DILD	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
DVLA	42,86%	42,86%	42,86%	33,33%
ELSA	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
FAST	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
GDYR	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
GEMA	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
GEMS	50,00%	60,00%	40,00%	50,00%
HRUM	40,00%	40,00%	40,00%	33,33%
INCO	30,00%	30,00%	33,33%	30,00%
INTP	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%
JPRS	50,00%	50,00%	50,00%	33,33%
KLBF	33,33%	33,33%	33,33%	42,86%
LPCK	50,00%	57,14%	33,33%	37,50%
LPIN	33,33%	33,33%	50,00%	50,00%
MDLN	50,00%	40,00%	40,00%	40,00%

MFMI	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
MTLA	33,33%	33,33%	33,33%	40,00%
PGAS	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
PTPP	33,33%	40,00%	40,00%	33,33%
SDPC	60,00%	60,00%	60,00%	50,00%
SGRO	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
SMRA	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
SMSM	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
STAR	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
TGKA	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
TLKM	40,00%	33,33%	42,86%	42,86%
TPIA	28,57%	28,57%	28,57%	42,86%
TURI	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
UNTR	50,00%	42,86%	42,86%	33,33%
VOKS	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
WICO	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
YPAS	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

LAMPIRAN 11

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Kode Saham	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	19	17	18	15
ADRO	6	3	4	3
AIMS	6	2	12	12
AKRA	5	4	7	8
ALDO	12	12	12	6
AMFG	2	2	2	5
ASII	4	4	4	4
ASRI	2	2	3	2
ATPK	4	1	1	3
BAPA	1	1	1	1
BATA	4	4	4	4
BKSL	9	4	8	11
BMTR	3	3	3	1
BRPT	8	7	7	7
BSDE	1	4	4	5
COWL	4	4	4	4
CPIN	9	10	10	6
CTBN	5	6	3	3
DILD	5	5	8	5
DVLA	1	1	1	1
ELSA	9	6	4	7
FAST	12	4	4	6
GDYR	3	4	4	4
GEMA	12	12	12	6
GEMS	5	4	5	6
HRUM	3	2	2	3
INCO	3	3	3	6
INTP	2	2	2	6
JPRS	6	3	6	10
KLBF	4	4	4	5
LPCK	12	11	7	6
LPIN	3	3	3	5
MDLN	4	4	11	5

MFMI	4	4	4	6
MTLA	2	2	2	6
PGAS	13	23	24	15
PTPP	13	12	10	12
SDPC	5	4	4	6
SGRO	8	7	3	2
SMRA	4	4	4	4
SMSM	4	4	4	4
STAR	4	5	5	5
TGKA	9	9	6	6
TLKM	8	13	15	15
TPIA	4	4	4	4
TURI	4	4	4	4
UNTR	4	4	4	5
VOKS	5	6	6	4
WICO	3	4	3	3
YPAS	4	5	6	7

LAMPIRAN 12

Tabel Jumlah Frekuensi Rapat Komite Audit

Kode Saham	Frekuensi Rapat Komite Audit			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	16	13	11	10
ADRO	23	24	24	25
AIMS	4	1	12	12
AKRA	12	16	4	5
ALDO	4	4	6	6
AMFG	15	11	14	15
ASII	6	5	7	9
ASRI	8	8	6	6
ATPK	4	4	4	4
BAPA	2	2	2	2
BATA	4	5	5	6
BKSL	13	15	12	14
BMTR	5	4	4	4
BRPT	8	8	8	8
BSDE	9	9	5	5
COWL	4	4	4	5
CPIN	36	36	32	33
CTBN	4	5	4	4
DILD	5	6	17	13
DVLA	1	2	4	4
ELSA	41	19	16	13
FAST	4	4	4	4
GDYR	4	4	4	4
GEMA	4	4	3	4
GEMS	5	6	5	4
HRUM	5	5	5	5
INCO	5	5	7	5
INTP	4	1	4	4
JPRS	12	12	12	12
KLBF	4	4	4	4
LPCK	4	5	4	4
LPIN	3	3	3	2
MDLN	4	4	9	9
MFMI	4	4	4	4

MTLA	3	3	4	4
PGAS	57	36	44	38
PTPP	24	30	38	41
SDPC	4	4	4	4
SGRO	4	4	4	4
SMRA	4	4	4	4
SMSM	4	4	4	4
STAR	4	5	5	5
TGKA	3	3	4	4
TLKM	20	30	50	34
TPIA	4	4	12	6
TURI	4	4	4	4
UNTR	4	4	4	5
VOKS	5	6	6	6
WICO	4	4	4	4
YPAS	4	4	4	4

LAMPIRAN 13

Tabel Kepemilikan Keluarga

Kode Saham	Kepemilikan Keluarga			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	0	0	0	0
ADRO	1	1	1	1
AIMS	0	0	0	0
AKRA	1	1	1	1
ALDO	1	1	1	1
AMFG	0	0	0	0
ASII	0	0	0	0
ASRI	0	0	0	0
ATPK	0	0	0	0
BAPA	0	0	0	0
BATA	1	1	1	1
BKSL	1	1	1	1
BMTR	1	1	1	1
BRPT	1	1	1	1
BSDE	1	1	1	1
COWL	0	0	0	0
CPIN	1	1	1	1
CTBN	1	1	1	1
DILD	1	1	1	1
DVLA	0	0	0	0
ELSA	0	0	0	0
FAST	1	1	1	1
GDYR	0	0	0	0
GEMA	0	0	0	0
GEMS	1	1	1	1
HRUM	0	0	0	0
INCO	0	0	0	0
INTP	0	0	0	0
JPRS	1	1	1	1
KLBF	1	1	1	1
LPCK	0	0	0	0
LPIN	0	0	0	0
MDLN	0	0	0	0
MFMI	0	0	0	0
MTLA	0	0	0	0

PGAS	0	0	0	0
PTPP	0	0	0	0
SDPC	0	0	0	0
SGRO	1	1	1	1
SMRA	1	1	1	1
SMSM	1	1	1	1
STAR	0	0	0	0
TGKA	1	1	1	1
TLKM	0	0	0	0
TPIA	1	1	1	1
TURI	1	1	1	1
UNTR	0	0	0	0
VOKS	1	1	1	1
WICO	0	0	0	0
YPAS	0	0	0	0

LAMPIRAN 14

Tabel Ukuran Perusahaan

Kode Saham	Ukuran Perusahaan (dinyatakan dalam jutaan rupiah)			
	2012	2013	2014	2015
ADHI	7.872.074	9.720.962	10.458.882	16.761.064
ADRO	64.300.162	82.159.319	79.762.813	82.193.328
AIMS	45.766	24.649	23.182	20.937
AKRA	11.787.525	14.630.143	14.790.104	15.203.130
ALDO	184.897	301.479	346.675	366.011
AMFG	3.115.421	3.539.393	3.946.125	4.270.275
ASII	182.247.000	213.884.000	236.207.000	245.435.000
ASRI	10.946.417	14.428.083	16.924.367	18.709.870
ATPK	150.829	1.489.339	1.795.865	1.773.314
BAPA	159.093	175.635	176.172	175.743
BATA	574.108	680.685	774.891	795.258
BKSL	6.154.231	10.654.201	9.986.974	11.145.897
BMTR	19.995.526	21.068.724	25.364.325	26.492.179
BRPT	20.504.858	28.479.529	28.918.625	31.079.041
BSDE	16.757.186	22.572.159	28.206.859	36.022.148
COWL	1.778.429	1.944.914	3.682.393	3.540.586
CPIN	12.348.627	15.704.502	20.841.795	24.684.915
CTBN	2.595.800	3.367.247	3.235.808	3.181.997
DILD	6.091.751	7.526.470	9.004.884	10.288.572
DVLA	1.074.691	1.195.107	1.241.240	1.376.278
ELSA	4.294.557	4.377.762	4.256.884	4.407.513
FAST	1.781.905	2.028.124	2.162.633	2.310.536
GDYR	1.198.261	1.364.647	1.566.110	1.645.843
GEMA	428.881	377.604	420.613	447.889
GEMS	3.361.142	3.993.669	3.925.293	5.099.191
HRUM	5.168.611	5.825.810	5.524.825	5.250.741
INCO	22.531.874	27.989.330	29.027.987	31.576.687
INTP	22.755.160	26.610.663	28.884.635	27.638.360
JPRS	398.606	377.253	371.965	363.265
KLBF	9.417.957	11.315.061	12.439.267	13.696.417
LPCK	2.832.001	3.854.166	4.390.499	5.476.757
LPIN	172.269	196.757	180.782	324.055
MDLN	4.591.920	9.560.060	10.359.147	12.843.051
MFMI	147.319	155.537	160.411	184.787
MTLA	2.015.753	2.834.603	3.250.878	3.620.743

PGAS	37.791.930	50.795.401	70.755.467	89.592.337
PTPP	8.544.146	12.392.826	14.579.155	19.128.812
SDPC	385.610	472.033	530.015	633.217
SGRO	4.137.700	4.512.143	5.468.888	7.294.673
SMRA	10.876.387	14.255.000	15.872.672	18.758.262
SMSM	1.556.214	1.717.857	1.757.634	2.220.108
STAR	751.721	749.403	775.918	729.051
TGKA	2.356.096	2.471.745	2.470.846	2.646.302
TLKM	111.369.000	128.555.000	141.822.000	166.173.000
TPIA	16.314.402	23.404.264	23.920.783	25.193.168
TURI	3.312.385	3.465.316	3.966.759	4.361.587
UNTR	50.300.633	57.362.244	60.306.777	61.715.399
VOKS	1.698.078	1.958.479	1.557.961	1.536.245
WICO	154.301	169.324	204.951	217.983
YPAS	349.438	614.051	320.882	279.190

LAMPIRAN 15

Tabel Tipe Industri Perusahaan

Kode Saham	Keterangan	Tipe Industri			
		2012	2013	2014	2015
ADHI	Properti dan real Estate - Konstruksi dan Bangunan	1	1	1	1
ADRO	Pertambangan - Pertambangan Batu Bara	1	1	1	1
AIMS	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produksi	0	0	0	0
AKRA	Perdagangan, Jasa dan investasi	0	0	0	0
ALDO	Industri Dasar Kimia - Pulp & Kertas	1	1	1	1
AMFG	Industri dasar Kimia - Keramik, Porselen dan kaca	1	1	1	1
ASII	Aneka Industri - Otomotif dan Komponennya	1	1	1	1
ASRI	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
ATPK	Pertambangan - Pertambangan Batu Bara	1	1	1	1
BAPA	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
BATA	Aneka industri - Alas Kaki	1	1	1	1
BKSL	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
BMTR	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perusahaan Investasi	0	0	0	0
BRPT	Industri dasar Kimia - Keramik, Porselen dan kaca	1	1	1	1
BSDE	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
COWL	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
CPIN	Industri dasar kimia - Pakan ternak	1	1	1	1
CTBN	Industri Dasar Kimia - logam dan Sejenisnya	1	1	1	1
DILD	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
DVLA	Industri Barang Konsumsi – Farmasi	1	1	1	1
ELSA	Pertambangan - Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1	1	1	1
FAST	Perdagangan, Jasa dan investasi – Restoran	0	0	0	0
GDYR	Aneka Industri - Otomotif dan Komponennya	1	1	1	1
GEMA	Perdagangan, Jasa dan investasi – Lainnya	0	0	0	0
GEMS	Pertambangan - Pertambangan Batu Bara	1	1	1	1
HRUM	Pertambangan - Pertambangan Batu Bara	1	1	1	1
INCO	Pertambangan - Pertambangan logam dan Mineral Lainnya	1	1	1	1
INTP	Industri dasar Kimia – semen	1	1	1	1
JPRS	Industri Dasar Kimia - logam dan Sejenisnya	1	1	1	1
KLBF	Industri Barang konsumsi – farmasi	1	1	1	1

LPCK	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
LPIN	Aneka Industri - Otomotif dan Komponennya	1	1	1	1
MDLN	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
MFMI	Perdagangan, Jasa dan investasi – Lainnya	0	0	0	0
MTLA	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
PGAS	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi – Energi	1	1	1	1
PTPP	Properti dan real Estate - Konstruksi dan Bangunan	1	1	1	1
SDPC	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produksi	0	0	0	0
SGRO	Pertanian – Perkebunan	1	1	1	1
SMRA	Properti dan real Estate - Properti dan real Estate	1	1	1	1
SMSM	Aneka Industri - Otomotif dan Komponennya	1	1	1	1
STAR	Aneka Industri - Tekstil dan Garmen	1	1	1	1
TGKA	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produksi	0	0	0	0
TLKM	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi – Telekomunikasi	1	1	1	1
TPIA	Industri dasar Kimia – Kimia	1	1	1	1
TURI	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produk	0	0	0	0
UNTR	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produksi	0	0	0	0
VOKS	Aneka Industri – Kabel	1	1	1	1
WICO	Perdagangan, Jasa dan investasi - Perdagangan Barang Produksi	0	0	0	0
YPAS	Industri dasar kimia - plastik dan kemasan	1	1	1	1

Keterangan :

1 = High Profile

0 = Low Profile